

Tanggal Akhir Perdagangan Saham dengan Hak	: 27 Nopember 1998	Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD	: 18 - 24 Desember 1998
Tanggal Mulai Perdagangan Saham tanpa Hak	: 30 Nopember 1998	Periode Pendaftaran dan Pembayaran	: 18 - 28 Desember 1998
Tanggal Akhir Penyerahan SKS	: 8 Desember 1998	Bukti HMETD	: 21 Desember 1998 - 4 Januari 1999
Tanggal Akhir Pencatatan dalam		Periode Penerbitan Surat Kolektip Saham	: 21 Desember 1998 - 4 Januari 1999
Daftar Pemegang Saham Yang Berhak	: 14 Desember 1998	Batas Akhir Tanggal Pembayaran Pemesanan	
Tanggal Efektif	: 15 Desember 1998	Tambahan	: 28 Desember 1998
Tanggal RUPSLB	: 15 Desember 1998	Tanggal Penjatahan	: 30 Desember 1998
Periode Distribusi Sertifikat Bukti HMETD	: 15 - 17 Desember 1998	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	
Periode Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD	: 16 Nopember - 8 Desember 1998	Saham Tambahan	: 4 Januari 1999
		Tanggal Mulai Pencatatan Saham di BEJ	: 18 Desember 1998

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK NISP Tbk BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



BANK NISP

PT BANK NISP Tbk

Bidang Usaha : Jasa Perbankan

Berkedudukan di Bandung, Indonesia

KANTOR PUSAT

Jl. Asia Afrika No. 100
Bandung 40261

Telp.: (022) 4201600 (Hunting)
Fax.: (022) 4201401, 433302
Teleks: 28191 NISPAA IA
e-mail: nisp@banknisp.com

KANTOR JAKARTA

Jl. Gunung Sahari No. 38,
Jakarta 10720

Telp.: (021) 6009037/38
Fax.: (021) 6006507, 6492264
Teleks: 41467, 41287 NISPJK IA
e-mail: wahyu@banknisp.com

PENAWARAN UMUM TERBATAS I KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Sebanyak-banyaknya sejumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 1.183 (seribu seratus delapan puluh tiga) saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Desember 1998 pukul 16.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Jakarta dimana saham Perseroan dicatatkan, mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk membeli 1.200 (seribu dua ratus) saham baru dengan harga Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

Jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham, dan seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dan akan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta.

Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "Sertifikat Bukti HMETD" atau "SBHMETD") dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar Bursa Efek Jakarta selama tidak kurang dari 7 (tujuh) hari mulai tanggal 18 Desember 1998 sampai dengan tanggal 24 Desember 1998. Pencatatan saham biasa akan dilakukan di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 18 Desember 1998.

UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham Perseroan yang tidak melaksanakan haknya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah yang cukup material yaitu maksimum sebesar 50,36%.

PT Bank NISP Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Penawaran Umum Terbatas I") melalui surat No. 155/SEKDIR/J/L/XI/98 pada tanggal 16 Nopember 1998 kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-57/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, juncto keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998 dan Peraturan No. IX.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-58/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, juncto Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-42/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data, keterangan atau laporan serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik dan norma profesinya.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan penjelasan/ atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya mendapat persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut dalam Penawaran Umum Terbatas I ini dengan tegas menyatakan tidak menjadi afiliasi dari Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tanggal 10 Nopember Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608).

Sesuai dengan Peraturan Nomor IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep.41/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam hal pemegang saham mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu dalam bentuk pecahan, maka Hak pecahan Efek tersebut menjadi milik Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum tanggal 30 Oktober 1992, persentase kepemilikan asing dalam suatu Bank Umum tidak diperkenankan melebihi 49% dari seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek. Dengan demikian apabila ada perdagangan Sertifikat Bukti HMETD yang berasal dari Pemegang Saham Lokal kepada Pemodal Asing, maka akan terdapat kemungkinan adanya Sertifikat Bukti HMETD yang tidak dapat dikonversikan menjadi saham. Apabila pemodal asing memperoleh Sertifikat Bukti HMETD dalam periode perdagangan Sertifikat Bukti HMETD yang berasal dari Pemegang Saham lokal, maka Pemodal Asing tersebut akan diberi kesempatan untuk melaksanakan Sertifikat Bukti HMETD menjadi saham dengan cara pemohon pertama akan dilayani terlebih dahulu (First Come First Serve) sampai tercapai porsi asing sebesar 49% dari seluruh saham yang dicatatkan pada bursa efek di Indonesia, dengan ketentuan Pemegang Saham per tanggal 14 Desember 1998 dijamin akan dipenuhi haknya. Untuk menghindari kemungkinan adanya Sertifikat Bukti HMETD yang tidak dapat dikonversikan menjadi saham maka para Pemodal Asing yang membeli Sertifikat Bukti HMETD pada masa perdagangan Sertifikat Bukti HMETD disarankan untuk terlebih dahulu memeriksa porsi kepemilikan asing yang tersedia.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 3 Desember 1998, kepemilikan saham oleh pemodal asing adalah 20,97 % dari seluruh saham yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal tersebut.

Penawaran Umum Terbatas I ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang / peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar Indonesia menerima Prospektus ini atau Sertifikat Bukti HMETD, maka dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham atau melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, kecuali bila penawaran tersebut, pembelian saham, maupun pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang / peraturan yang berlaku di negara tersebut.

Informasi, data, pendapat dan laporan yang dimuat dalam Prospektus ini disajikan dan dibuat berdasarkan keadaan Perseroan sampai dengan tanggal penerbitan Prospektus ini, kecuali apabila secara tegas dinyatakan lain. Pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk diartikan atau ditafsirkan bahwa tidak ada perubahan dari informasi, data, pendapat dan laporan setelah tanggal penerbitan Prospektus ini. Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak ada lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

RINGKASAN	ii
I. PENAWARAN UMUM TERBATAS I	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS I	5
III. PERNYATAAN HUTANG	6
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	10
1. UMUM	10
2. KEUANGAN	11
3. PROSPEK USAHA	18
V. RISIKO USAHA	20
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	22
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	23
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	23
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	23
3. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	24
4. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN AFILIASI	26
5. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	30
6. SUMBER DAYA MANUSIA	34
7. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN	37
8. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	37
9. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	37
VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	38
1. UMUM	38
2. KEGIATAN USAHA	41
3. PEMASARAN	49
4. TINGKAT KESEHATAN	50
5. PROSPEK USAHA	52
6. LAIN-LAIN	54
IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	55
X. EKUITAS	57
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN	59
XII. PERPAJAKAN	60
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	61
XIV. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	63
XV. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)	68
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)	71
XVII. INFORMASI TAMBAHAN	72

RINGKASAN

Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci serta laporan keuangan dan penjelasannya yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang rupiah dan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Perseroan memulai usahanya di kota Bandung sejak tahun 1941, yang kemudian memperluas jaringannya di daerah Jawa Barat dan sekitarnya, sehingga sampai saat ini Perseroan telah memiliki 59 jaringan kantor yang tersebar di daerah Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Pulau Batam. Sejalan dengan perkembangan usaha Perseroan maka jaringan yang lebih luas akan terus dikembangkan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	1996	1997	31 Agustus 1998
Total aktiva	1.198.930	1.703.667	2.878.337
Kredit yang diberikan (net)	866.851	1.152.754	1.190.378
Total dana	1.020.091	1.438.076	2.604.898
Total kewajiban	1.070.864	1.530.590	2.699.857
Total ekuitas	128.066	173.077	178.480
Laba bersih	18.637	24.182	16.089
ROAE	15,29%	16,06%	15,44%
ROAA	1,80%	1,67%	1,11%
LDR	79,20%	75,38%	45,28%

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (1993 - 1997), Bank NISP mencatat pertumbuhan aktiva rata-rata sebesar 35% pada setiap tahunnya. Pertumbuhan total aktiva yang menyolok ditahun 1997 dan 1998 diantaranya disebabkan oleh faktor depresiasi Rupiah terhadap US dollar, yang mengakibatkan aktiva dalam mata uang asing meningkat secara luar biasa ketika diterjemahkan kedalam Rupiah. Ditahun 1997, Perseroan membukukan total aktiva sebesar Rp 1.703,7 miliar atau meningkat 42% dibandingkan dengan tahun 1996. Jika pengaruh depresiasi Rupiah diabaikan, maka pertumbuhan riil total aktiva sesungguhnya sekitar 23%. Per 31 Agustus 1998, Perseroan mencatat total aktiva sebesar Rp 2.878,34 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 68,95% dibandingkan dengan tahun 1997, namun pertumbuhan riil sesungguhnya sekitar 44%.

Total ekuitas Perseroan pada tahun 1997 sebesar Rp 173,08 miliar atau meningkat 35,15% dibandingkan dengan tahun 1996 yang sebesar Rp 128,07 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh dibukukannya selisih penilaian kembali aktiva tetap sebesar Rp. 26,95 miliar, serta ditunjang pula oleh peningkatan laba ditahan sebesar 45,93% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga laba ditahan Perseroan pada tahun 1997 mencapai Rp. 57,37 miliar.

Pembayaran saham bonus dengan rasio 5 saham lama : 2 saham baru, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 1997, menghasilkan peningkatan modal disetor sebesar Rp 25 milyar, yaitu dari Rp 62,5 milyar menjadi Rp 87,5 miliar. Disamping itu pada tanggal 3 Februari 1997, Perseroan melakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp. 1.000,- per lembar saham menjadi Rp. 500,- (stock split), sehingga jumlah modal disetor Perseroan meningkat dari 62,5 juta lembar saham menjadi 175 juta lembar saham.

Per 31 Agustus 1998, total ekuitas mencapai Rp. 178,48 miliar, yang terdiri dari modal disetor sebesar Rp. 87,5 miliar, agio sebesar Rp. 1,25 miliar, selisih penilaian kembali aktiva tetap sebesar Rp. 27,69 miliar dan laba ditahan sebesar Rp. 62,04 miliar.

Ditahun 1997, Bank NISP mencatat peningkatan laba bersih sebesar 29,75% dari Rp 18,64 miliar pada tahun 1996 menjadi Rp 24,18 miliar, sehingga menghasilkan rasio imbal hasil terhadap aktiva rata-rata (Return on Average Assets-ROAA) sebesar 1,66% dan rasio imbal hasil terhadap ekuitas rata-rata (Return on Average Equity - ROAE) sebesar 16,06%. Per 31 Agustus 1998, laba bersih Perseroan telah mencapai Rp 16,09 miliar, dengan rasio imbal hasil terhadap aktiva rata-rata (Return on Average Assets - ROAA) sebesar 1,11% dan rasio imbal hasil terhadap ekuitas rata-rata (Return on Average Equity - ROAE) sebesar 15,44%.

Ditinjau dari segi penghimpunan dana, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (1993 - 1997), Perseroan berhasil mencatat pertumbuhan dana pihak ketiga secara rata-rata sebesar 23% pada setiap tahunnya. Per 31 Agustus 1998, dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun Perseroan sebesar Rp 1.924,16 miliar atau meningkat 111,54% dibandingkan dengan tahun 1997. Jika pengaruh depresiasi Rupiah diabaikan, maka pertumbuhan riil dana pihak ketiga adalah sekitar 88,85 %. Komposisi terbesar dari dana pihak ketiga yang dihimpun Perseroan berasal dari deposito dimana meliputi 77% dari keseluruhan dana pihak ketiga.

Disamping dana pihak ketiga, Perseroan melakukan diversifikasi sumber dana melalui emisi Obligasi Bank NISP I tahun 1997 senilai Rp 150 milyar serta melalui sumber-sumber dana yang berasal dari pinjaman yang diterima sebesar Rp 530,74 milyar (per 31 Agustus 1998) yang berasal dari berbagai lembaga keuangan internasional terkemuka, diantaranya berasal dari Bank Pembangunan Belanda (FMO), International Finance Corporation (IFC), Export Import Bank of Japan. Bank NISP juga terlibat dalam program USAID di Indonesia dan mendapatkan fasilitas GSM-102 dalam Program Penjamin Kredit Ekspor dari Departemen Pertanian Amerika Serikat. Diversifikasi sumber dana dengan fokus utama pada perolehan dana jangka panjang, selain untuk menjaga stabilitas likuiditas, juga untuk meminimumkan biaya dana, karena sumber dana non-tradisional tersebut cost of fund (biaya dananya) umumnya cukup rendah.

Ditinjau dari segi penyaluran dana, Perseroan berhasil menempatkan dananya kedalam aktiva-aktiva yang sifatnya produktif, melalui pemberian kredit, penempatan dibank lain, penempatan pada surat berharga dan penyertaan. Total aktiva produktif Perseroan per 31 Agustus 1998 sebesar Rp 2.546,77 miliar, dimana penyaluran kredit meliputi 49% dari keseluruhan aktiva produktif.

Portofolio kredit Perseroan saat ini terutama disalurkan ke sektor perdagangan (32% dari total kredit), jasa (32% dari total kredit) dan perindustrian (25% dari total kredit).

Sebagian besar dari portofolio kredit berada dalam kategori skala kecil dan menengah dimana hal ini sejalan dengan strategi Perseroan yang memfokuskan pangsa pasarnya pada sektor ritel. Per 31 Desember 1997, sekitar 39% kredit diberikan dalam nilai kurang dari Rp 500 juta, 39% antara Rp 500 juta sampai Rp 5 milyar dan 22% diberikan dalam nilai lebih dari Rp 5 milyar. Sejak terjadinya krisis, komposisi kredit ditahun 1998 seakan-akan mengalami pergeseran, dimana prosentase kredit skala menengah dan besar tampak mendominasi. Hal ini disebabkan oleh terjadinya lonjakan nilai kurs valuta asing, sehingga kredit yang dinyatakan dalam valuta asing nilainya meningkat secara menyolok.

Perseroan lebih memfokuskan penyaluran dananya kedalam kredit jangka pendek dan jangka menengah. Per 31 Agustus 1998, 80% dari total kredit yang disalurkan berjangka waktu dibawah 2 tahun, dan 77% dari total kredit diberikan dalam bentuk kredit modal kerja.

Dari segi target pasar, Bank NISP masih tetap berkeyakinan bahwa sesuai dengan pengalaman dan pemahamannya terhadap pangsa pasar ritel yang ditanganinya selama ini, maka sektor tersebut masih menjadi pangsa pasar utama dari Perseroan. Didukung pula oleh kenyataan, bahwa dimasa sulit yang

saat ini tengah dialami oleh dunia usaha, telah membuktikan bahwa sektor tersebutlah yang praktis masih mampu bertahan bahkan berpeluang untuk terus berkembang. Namun demikian, untuk meningkatkan daya saing Perseroan di era globalisasi, maka Perseroan senantiasa mencari peluang untuk menggarap segmen lainnya diluar ritel.

Kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam rangka Penyehatan Perbankan mempunyai dampak yang luar biasa terhadap seluruh bank di Indonesia, demikian juga halnya dengan Perseroan. Disatu sisi Perseroan melihatnya sebagai tantangan besar untuk lebih meningkatkan profesionalisme dan prinsip kehati-hatian bank, namun di lain sisi dilihatnya sebagai peluang untuk meraih pangsa pasar yang lebih besar dengan terjadinya pergeseran signifikan dari pangsa pasar perbankan nasional.

Didalam situasi perekonomian yang memburuk saat ini, dimana perbankan dihadapkan kepada kondisi meningkatnya rata-rata suku bunga yang berakibat terciptanya kondisi negative spread serta masih belum tercapainya stabilitas nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, dimana kedua kondisi ini memberikan dampak kepada peningkatan kredit bermasalah yang akhirnya menurunkan kualitas aktiva produktif Perseroan. Untuk menanggulangi risiko ini Perseroan terus menerus meningkatkan aktivitas pemeliharaan kredit serta membentuk cadangan yang tinggi sesuai ketentuan dari Bank Indonesia nomor 30/17/UPPB tanggal 24 Februari 1998.

Untuk menjaga keseimbangan struktur pendanaan dan tingkat kesehatan yang optimal, diperlukan adanya peningkatan permodalan Perseroan. Oleh sebab itu Perseroan berencana untuk melakukan peningkatan modal melalui Penawaran Umum Terbatas kepada masyarakat.

Penawaran Umum Terbatas I

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Terbatas I kepada para Pemegang Saham Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 500,- (lima ratus rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 1.183 (seribu seratus delapan puluh tiga) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 14 Desember 1998 pukul 16.00 WIB mempunyai hak untuk membeli sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) saham baru dengan harga penawaran Rp 500,- (lima ratus rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat pelaksanaan HMETD. Jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) saham, yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dan akan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta.

Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas I

Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana hasil emisi setelah dikurangi biaya-biaya emisi adalah sebagai berikut:

Dana hasil Penawaran Umum Terbatas I, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, apabila 300.000.000 (tiga ratus juta) saham dikeluarkan seluruhnya akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan, sehingga akan meningkatkan Rasio Kecukupan Modal (CAR) dari 10,52% pada 31 Agustus 1998 menjadi 18,71% setelah Penawaran Umum Terbatas I. Peningkatan permodalan dan Rasio Kecukupan Modal ini juga akan meningkatkan kemampuan penanaman dalam Aktiva Produktif Perseroan.

Kebijakan Dividen

Tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, mulai tahun 1998 Perseroan merencanakan untuk membayar dividen kas sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham dengan rincian sebagai berikut:

	Laba Bersih	Persentase Dividen Terhadap Laba Bersih
Sampai dengan	Rp 30 miliar	20% - 30%
Lebih dari	Rp 30 miliar	31% - 40%

Sejak Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan tahun 1994, Perseroan senantiasa membagikan dividen kas (tunai) kepada para pemegang saham sesuai dengan kebijakan dividen yang dimuat dalam Prospektus Penawaran Umum Saham Perdana tahun 1994. Realisasi pembayaran dividen kas (tunai) sejak tahun buku 1994 sampai dengan 1997 berkisar antara 23,11%-47,22% dari laba bersih Perseroan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Terbatas I Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Kepada Para Pemegang Saham sejumlah sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap saham.

Setiap pemegang 1.183 (seribu seratus delapan puluh tiga) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 14 Desember 1998 pukul 16.00 WIB mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk membeli sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) saham baru dengan harga Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

SERTIFIKAT BUKTI HMETD AKAN DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK JAKARTA ATAU DAPAT JUGA DILUAR BURSA SELAMA 7 (TUJUH) HARI MULAI TANGGAL 18 DESEMBER 1998 SAMPAI DENGAN TANGGAL 24 DESEMBER 1998. PENCATATAN ATAS SAHAM AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK JAKARTA PADA TANGGAL 18 DESEMBER 1998.



BANK NISP

PT BANK NISP Tbk

Bidang Usaha : Jasa Perbankan
Berkedudukan di Bandung, Indonesia

KANTOR PUSAT

Jl. Asia Afrika No. 100, Bandung 40261
Telp.: (022) 4201600 (Hunting); Fax.: (022) 4201401, 433302; Telex: 28191 NISPAA IA
e-mail: nisp@banknisp.com

KANTOR JAKARTA

Jl. Gunung Sahari No. 38, Jakarta 10720
Telp.: (021) 6009037-38; Fax.: (021) 6006507, 6492264; Telex: 41467, 41287 NISPJK IA
e-mail: wahyu@banknisp.com

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETIDAKMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI KREDIT YANG DIBERIKAN, DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

SELAIN ITU, MEMBURUKNYA KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA SERTA BELUM TERCAPAINYA STABILITAS NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP MATA UANG ASING, MENYEBABKAN INDUSTRI PERBANKAN DIHADAPKAN DENGAN PERSOALAN MENINGKATNYA JUMLAH KREDIT BERMASALAH SEBAGAI AKIBAT DARI TINGGINYA TINGKAT BUNGA SERTA MELONJAKNYA NILAI KREDIT DALAM VALUTA ASING. TINGGINYA TINGKAT BUNGA SAAT INI JUGA DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA KONDISI "NEGATIVE SPREAD" SEHINGGA DAPAT MENURUNKAN RENTABILITAS PERSEROAN.

RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V DARI PROSPEKTUS INI.

Perseroan didirikan di Bandung dengan nama "N.V. NEDERLANDSCH INDISCHE SPAAR EN DEPOSITOBANK Genaamd N.I.S.P" berdasarkan Akta No. 6, dibuat dihadapan Theodoor Johan Indewey Gerlings, Notaris di Purwakarta, dan telah disetujui oleh yang berwajib menurut penetapan Directeur van Justitie tanggal 28 April 1941 No. A.42/6/9 dan diumumkan dalam Berita Javasche Courant tanggal 20 Juni 1941 No. 49, Bijvoegsel No. 196 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 16 Januari 1951, Tambahan No. 21.

Perseroan memperoleh ijin usaha sebagai bank umum pada tahun 1967 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. D.15.6.2.27 tanggal 20 Juli 1967. Berdasarkan Keputusan Bank Indonesia No. 23/9/KEP/DIR tanggal 19 Mei 1990, Perseroan memperoleh ijin usaha sebagai bank devisa dan mulai beroperasi sebagai bank devisa sejak tanggal 3 Agustus 1990. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S.35/MK.03/1993 tanggal 6 Januari 1993, Perseroan memperoleh status sebagai Bank Persepsi untuk menerima setoran-setoran pajak dan bukan pajak.

Uraian mengenai riwayat saham Perseroan sebelum Penawaran Umum Terbatas I dapat dibaca dalam Prospektus Penawaran Umum Saham yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 September 1994 dan Prospektus Penerbitan Obligasi I Tahun 1997 yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 1997.

Sebelum Penawaran Umum Terbatas I, Perseroan telah mencatatkan seluruh saham yang telah dikeluarkannya (company listing) pada Bursa Efek Jakarta. Jumlah seluruh pencatatan saham tersebut adalah sebanyak 295.750.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham yang merupakan seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Rincian pencatatan saham tersebut tertera dalam tabel berikut ini:

Keterangan Saham	Tanggal Pencatatan	Jumlah Saham Dicatatkan	Bursa
Penawaran Umum Perdana	20/10/1994	12.500.000	BEJ
Saham Pendiri	20/10/1994	50.000.000	BEJ
Saham Bonus I	28/2/1997	25.000.000	BEJ
Hasil Pemecahan Nilai nominal Saham (Stock Split)	3/2/1997	175.000.000	BEJ
Saham Bonus II	4/12/1998	57.750.000	BEJ
Dividen Saham	4/12/1998	63.000.000	BEJ
Total Pencatatan Saham	-	295.750.000	BEJ

Setelah Penerbitan Obligasi I Bank NISP Tahun 1997, Anggaran Dasar Perseroan diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank NISP Tbk No. 95 tanggal 29 Juni 1998, yang dibuat oleh Ny. Indah Fatmawati, S.H, pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-10.358 HT.01.04.Th.98 tanggal 5 Agustus 1998 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Dengan nomor. TDP.10111800142 dan nomor Agenda Pendaftaran: 19.1/BH.10.11/VIII/98 tanggal 20 Agustus 1998 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 23 Oktober 1998, Tambahan No. 5932.

Adapun komposisi modal saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp. 500,- (lima ratus rupiah) Setiap Saham

Uraian	Modal Dasar	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham	1.000.000.000	175.000.000
Jumlah Nominal (Rp)	500.000.000.000	87.500.000.000

Susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 16 Nopember 1998 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. PT Suryasono Sentosa	58.555.000	29.277.500.000	33,46
2. PT Udayawira Utama	58.555.000	29.277.500.000	33,46
3. Karmaka Surjaudaja	140.000	70.000.000	0,08
4. Masyarakat	57.750.000	28.875.000.000	33,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	175.000.000	87.500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	825.000.000	412.500.000.000	

Pada saat RULBPS tanggal 29 Juni 1998 juga telah disetujui untuk membagikan saham bonus dan dividen saham. Setelah pembagian saham bonus dan dividen saham yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 1998, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan secara proforma adalah sebagai berikut:

	Sebelum pembagian saham bonus & dividen saham		Setelah pembagian saham bonus dan dividen saham	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	1.000.000.000	500.000.000.000	1000.000.000	500.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
1. PT Suryasono Sentosa	58.555.000	29.277.500.000	98.957.950	49.478.975.000
2. PT Udayawira Utama	58.555.000	29.277.500.000	98.957.950	49.478.975.000
3. Karmaka Surjaudaja	140.000	70.000.000	236.600	118.300.000
4. Masyarakat	57.750.000	28.875.000.000	97.597.500	48.798.750.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	175.000.000	87.500.000.000	295.750.000	147.875.000.000
Jumlah Saham Dalam Portepel	825.000.000	412.500.000.000	704.250.000	352.125.000.000

Dengan dilaksanakannya hak atas HMETD maka struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Terbatas I secara proforma apabila 300.000.000 (tiga ratus juta) saham dikeluarkan adalah sebagai berikut:

	Sebelum Penawaran Umum Terbatas I		Setelah Penawaran Umum Terbatas I	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham (Sebanyak-banyaknya)	Jumlah Nilai Nominal (Rp) (Sebanyak-banyaknya)
Modal Dasar	1.000.000.000	500.000.000.000	1.000.000.000	500.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
- Saham Lama	295.750.000	147.875.000.000	295.750.000	147.875.000.000
- Saham Baru yang ditawarkan			300.000.000	150.000.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	295.750.000	147.875.000.000	595.750.000	297.875.000.000
Jumlah Saham Dalam Portepel	704.250.000	352.125.000.000	404.250.000	202.125.000.000

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan kepada para Pemegang Saham dalam Penawaran Umum Terbatas I ini seluruhnya terdiri dari saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel, yang akan memperoleh hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

Pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain sejak tanggal 18 Desember 1998 sampai dengan tanggal 24 Desember 1998 melalui Bursa Efek Jakarta atau dapat juga dilakukan di luar Bursa sesuai dengan Peraturan Nomor IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-57/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, juncto Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-41/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Pemegang Saham yang tidak melaksanakan haknya dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) dalam jumlah yang cukup material yaitu sampai dengan maksimum 50,36 % (lima puluh koma tiga puluh enam persen).

Seluruh saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I ini akan dicatatkan seluruhnya di Bursa Efek Jakarta, sehingga jumlah seluruh saham Perseroan yang akan tercatat di bursa tersebut adalah sebanyak-banyaknya 595.750.000 (lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham (*company listing*).

Dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini, Perseroan tidak akan mengeluarkan atau mencatatkan saham baru atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham di luar yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I ini.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Dana hasil Penawaran Umum Terbatas I, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, apabila 300.000.000 (tiga ratus juta) saham dikeluarkan seluruhnya akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan, sehingga akan meningkatkan Rasio kecukupan Modal (CAR) dari 10,52% pada 31 Agustus 1998 menjadi 18,71% setelah Penawaran Umum Terbatas I. Peningkatan permodalan dan Rasio Kecukupan Modal ini juga akan meningkatkan kemampuan penanaman dalam Aktiva Produktif Perseroan. Dana ini tidak akan dipergunakan untuk melunasi hutang dari pihak afiliasi maupun pihak ketiga lainnya.

Perseroan berjanji akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I ini secara periodik kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dananya tidak seperti yang diungkapkan dalam Prospektus ini, maka terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Bank NISP I tahun 1997 telah dipergunakan seluruhnya sesuai dengan penggunaan dana yang telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan pada tanggal 29 Mei 1997.

III. PERNYATAAN HUTANG

A. PERNYATAAN HUTANG PER TANGGAL 31 AGUSTUS 1998 (AUDITED)

Pada tanggal 31 Agustus 1998 Bank mempunyai (A) Kewajiban sebesar Rp. 2.699,86 miliar dan (B) Kewajiban karena komitmen dan kontinjensi sebesar Rp. 218.74 miliar dengan perincian sebagai berikut :

(dalam miliar Rupiah)

KEWAJIBAN	
Simpanan	
Giro	232,44
Tabungan	208,88
Deposito	1.342,53
Sertifikat Deposito-bersih	140,31
Jumlah	1.924,16
Pinjaman yang diterima	530,74
Hutang Pajak	6,45
Surat berharga yang diterbitkan	150,00
Kewajiban segera lainnya	37,84
Kewajiban sewa guna usaha	13,88
Kewajiban lainnya	36,79
Jumlah kewajiban	2.699,86
KEWAJIBAN KARENA KOMITMEN DAN KONTINJENSI	
Kewajiban Komitmen	
Fasilitas kredit yang belum dipergunakan	183,54
L/C irrevocable dalam rangka impor dan ekspor	2,77
Penjualan valuta asing tunai yang belum diselesaikan	9,77
Akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka	9,51
Jumlah kewajiban komitmen	205,59
Kewajiban kontinjensi	
Penerbitan jaminan dalam bentuk :	
Bank garansi	12,00
Akseptasi atau endosemen surat berharga	1,00
Lain-lain	0,15
Jumlah kewajiban kontinjensi	13,15
Jumlah kewajiban komitmen dan kontinjensi	218,74

A.1. KEWAJIBAN

1. HUTANG DALAM BENTUK SIMPANAN

Hutang dalam bentuk simpanan sebesar Rp. 1.924,16 miliar terdiri dari :

Keterangan	(dalam miliar Rupiah)		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
Giro			
Pihak lain	148,04	84,21	232,25
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	0,05	0,14	0,19
Tabungan			
Pihak lain	206,97	-	206,97
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	1,91	-	1,91
Deposito berjangka			
Pihak lain	1.059,18	268,03	1.327,21
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	11,95	3,37	15,32
Sertifikat deposito - bersih	140,31	-	140,31
Jumlah	1.568,41	355,75	1.924,16

Tingkat bunga rata-rata rekening giro dalam rupiah adalah sebesar 13,44% per tahun sedangkan dalam valuta asing adalah sebesar 4,91% per tahun, tabungan adalah sebesar 20,89% per tahun dan deposito berjangka dalam rupiah adalah sebesar 39,69% per tahun, sedangkan dalam valuta asing adalah sebesar 9,28% per tahun dan sertifikat deposito adalah sebesar 54,63% per tahun.

2. PINJAMAN YANG DITERIMA

Rincian pinjaman yang diterima adalah sebagai berikut :

Rupiah :

	(dalam miliar Rupiah)
a. Pinjaman Likuiditas dari Bank Indonesia	0,5
b. Penerusan Pinjaman (two step loan)	53,17
c. Pinjaman lainnya	9,31
d. Medium Term Notes	125,00
e. Call Money PT. Daiwa Perdania Bank (hubungan istimewa)	8,00
Jumlah	195,99

Mata uang asing :

Pinjaman dari Bank lain

	(dalam miliar Rupiah)
a. The Daiwa Bank Limited (USD 900,000)	9,97
b. N.V De Indosische overzeese Bank (USD 4,000,000)	44,30
c. Ing Bank N.V Singapore Bank (USD 1,125,000)	12,46
d. International Finance Corporation (USD 10,000,000)	110,75
e. Bank Brussels Lambert (USD 5,000,000)	55,38
f. Overseas Chinese Banking Corporation (USD 9,200,000)	101,89
Jumlah	334,75
Jumlah pinjaman yang diterima	530,74

Tingkat suku bunga pinjaman Bank Indonesia sebesar 5,2%. Tingkat suku bunga rata-rata pinjaman Bank Exim Jepang (Two Step Loan melalui Bank Indonesia) setara dengan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia jangka waktu 3 bulan. Tingkat suku bunga Nederlandse Financiaering Maatchappij Voor Ontwikkelingslanden N.V. sebesar 22,47%.

3. HUTANG PAJAK

Posisi hutang pajak bank pada tanggal 31 Agustus 1998 adalah sebesar Rp. 6,45 miliar yang terdiri dari :

	<i>(dalam miliar Rupiah)</i>
Hutang pajak yang masih harus dibayar pasal 21	0,17
Hutang pajak yang masih harus dibayar pasal 23	6,28
Jumlah	6,45

4. KEWAJIBAN SEGERA LAINNYA

	<i>(dalam miliar Rupiah)</i>
Bunga yang masih harus dibayar	26,69
Dana hasil kliring	6,85
Rupa-rupa	4,30
Jumlah	37,84

5. KEWAJIBAN SEWA GUNA USAHA

Hutang sewa guna usaha sebesar Rp. 13,88 miliar (USD 1,253,163.34) merupakan kewajiban sewa guna usaha kepada PT. Daiwa Lippo Leasing, pembayaran sewa minimum sampai dengan tahun 2001 dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam miliar Rupiah)</i>
1998	1,61
1999	4,83
2000	4,83
2001	3,54
	14,81
Dikurangi bunga	(0,93)
Jumlah	13,88

6. KEWAJIBAN LAIN-LAIN

	<i>(dalam miliar Rupiah)</i>
Setoran Jaminan	1,75
Biaya yang masih harus dibayar	16,26
Provisi dan komisi diterima dimuka	5,94
Hutang Dividen	11,43
Rupa-rupa	1,41
Jumlah	36,79

A.2. KEWAJIBAN KARENA KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Agustus 1998, bank memiliki kewajiban komitmen sebesar Rp. 205,59 miliar dan kewajiban kontinjensi sebesar Rp. 13,15 miliar. Kewajiban komitmen terdiri dari fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan, akseptasi wesel import atas dasar letters of credit berjangka, irrevocable letters of credit yang masih berjalan dalam rangka impor dan ekspor, penjualan berjangka valuta asing yang belum diselesaikan. Kewajiban kontinjensi terdiri dari penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi, akseptasi endosemen surat berharga, hutang pajak dan lain-lain.

B. PERNYATAAN HUTANG PER TANGGAL 31 OKTOBER 1998 (UNAUDITED)

Pada tanggal 31 Oktober 1998 Bank mempunyai (A) Kewajiban sebesar Rp. 2.503,61 miliar dan (B) Kewajiban karena komitmen dan kontinjensi sebesar Rp 195,05 miliar dengan perincian sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

KEWAJIBAN	
Simpanan	
Giro	207,23
Tabungan	190,68
Deposito	1.287,62
Sertifikat Deposito-bersih	134,42
Jumlah	1.819,95
Pinjaman yang diterima	417,93
Surat berharga yang diterbitkan	150,00
Kewajiban segera lainnya	55,47
Kewajiban sewa guna usaha	8,41
Taksiran Hutang Pajak	9,41
Kewajiban lainnya	42,45
Jumlah kewajiban	2.503,61
KEWAJIBAN KARENA KOMITMEN DAN KONTINJENSI	
Kewajiban Komitmen	
Fasilitas kredit yang belum dipergunakan	164,31
L/C irrevocable dalam rangka impor dan ekspor	6,33
Penjualan valuta asing tunai yang belum diselesaikan	4,71
Akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka	3,88
Jumlah kewajiban komitmen	179,23
Kewajiban kontinjensi	
Penerbitan jaminan dalam bentuk :	
Bank garansi	15,82
Akseptasi atau endosemen surat berharga	0
Lain-lain	0
Jumlah kewajiban kontinjensi	15,82
Jumlah kewajiban komitmen dan kontinjensi	195,05

- C. Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewajiban dan komitmen lain selain yang dinyatakan diatas dan telah diungkapkan dalam laporan keuangan serta disajikan dalam Prospektus.

Melihat kepada keadaan likuiditas Perseroan, serta kinerja yang berhasil dicapai sepanjang tahun 1998 ini, sebagaimana tercermin pada peningkatan pencapaian laba dan tingkat excess likuiditas yang tinggi, sehingga manajemen merasa yakin bahwa Perseroan mempunyai kesanggupan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. UMUM

Bank NISP didirikan di Bandung pada tahun 1941 dan memperoleh status sebagai bank komersial pada tahun 1967. Pada tahun 1972, Bank NISP menandatangani perjanjian kerjasama pembiayaan dan bantuan teknis dengan Daiwa Bank dari Jepang, melalui PT Bank Daiwa Perdania, yang merupakan bank patungan pertama di Indonesia. Bank NISP memperoleh status sebagai bank devisa pada tahun 1990, dan kemudian melakukan Penawaran Umum (go public) pada tahun 1994.

Pada tahun 1995, Bank NISP memperoleh sertifikat ISO 9002 untuk divisi Treasury dan Lembaga Keuangan. Selanjutnya pada tahun 1996, sertifikasi ISO 9002 diberikan untuk seluruh satuan kerja kantor pusat Bank NISP.

Pada tahun 1997, Bank NISP melakukan kerjasama dengan OCBC Bank dari Singapura dan melahirkan Bank OCBC-NISP.

Sampai dengan tanggal 30 September 1998, Bank NISP memiliki 59 kantor dengan 64% kantornya terkonsentrasi di Jawa Barat. Jumlah ini meningkat dari tahun 1996 dengan 42 jaringan kantor, dan tahun 1997 sebanyak 56 kantor. Seiring dengan peningkatan jumlah kantor, jumlah karyawanpun meningkat dari 928 orang ditahun 1996 menjadi 1.088 ditahun 1997 dan per 30 September 1998 jumlah karyawannya sebanyak 1.110 orang. Dilihat dari sudut produktivitas karyawan, Bank NISP mencatat kenaikan produktivitas secara berarti dalam kurun waktu lima tahun belakangan ini, yaitu meningkat dari Rp. 514 juta/orang ditahun 1993 menjadi Rp. 1.566 juta/orang di tahun 1997. Per 30 September 1998 tingkat produktivitas karyawannya Rp. 2.657 juta/orang.

Bank NISP memfokuskan diri pada pembiayaan usaha skala kecil dan menengah, terutama dalam bentuk Kredit Usaha Kecil (KUK). Dalam menjalankan aktivitasnya ini Bank NISP memperoleh kepercayaan dalam bentuk pinjaman dari Export Import Bank of Japan dan FMO (Bank Pembangunan Belanda), serta beberapa lembaga keuangan terkemuka lainnya. Disamping itu Bank NISP juga terlibat dalam program USAID di Indonesia dan mendapatkan fasilitas GSM-102 dalam Program Penjamin Kredit Ekspor dari Departemen Pertanian Amerika Serikat.

Pada bulan Juni 1997, Bank NISP menerbitkan Obligasi Bank NISP 1 senilai Rp. 150 milyar dengan jangka waktu 5 tahun. Obligasi tersebut memperoleh peringkat BBB dari 'Thomson BankWatch', yang merupakan lembaga pemeringkat bank terbesar di dunia, dimana peringkat yang dihasilkan tersebut merupakan peringkat tertinggi yang dapat dicapai oleh perusahaan di Indonesia.

Pada bulan Oktober 1997, Bank NISP memperoleh pinjaman berjangka waktu 5 tahun dari IFC (International Finance Corporation) sebesar US\$ 10 juta dan menjadikan Bank NISP sebagai bank pertama di Indonesia yang menerima pinjaman bilateral langsung dari IFC. Berdasarkan data portofolio investasi IFC per 30 Juni 1998, Bank NISP merupakan satu-satunya bank di Indonesia yang memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan tersebut.

Pada tanggal 27 Maret 1998, Bank NISP menerima penghargaan "Asian Banking Award 1998" untuk kategori "Commercial Credit Program" dan "Operational Efficiency Program". Sebelumnya, ditahun 1997, Bank NISP menerima penghargaan yang sama untuk kategori "Credit Quality".

Berdasarkan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MOU)* pada tanggal 27 Juli 1998, Bank NISP termasuk diantara 21 bank pelaksana (terdiri dari 7 Bank Pemerintah dan 14 Bank swasta) yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk menyalurkan kredit kepada eksportir dan distributor guna menggerakkan perekonomian, khususnya menggerakkan ekspor dan distribusi. Disamping itu, Bank NISP termasuk pula diantara ke-28 bank (terdiri dari 7 Bank Pemerintah dan 21 Bank swasta) yang pembukaan L/C impornya dijamin oleh Bank Indonesia.

Bank NISP menawarkan produk-produk jasa perbankan pada umumnya. Produk penghimpunan dana hadir dalam bentuk rekening giro, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito. Sedangkan bentuk-bentuk penyaluran dana antara lain dikenal dengan istilah kredit profesi, kredit ekspor, kredit konsumen dan kredit komersial. Bank NISP juga memiliki divisi corporate finance yang antara lain terlibat dalam pemberian kredit sindikasi dan penasehat jasa keuangan. Selain itu, melalui divisi pendapatan non bunga, Bank NISP juga menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia, yang pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan pendapatan non-bunga melalui kegiatan *bancassurance*.

2. KEUANGAN

2.1 Pertumbuhan Pendapatan dan Beban Operasional

Pendapatan Bunga

Pada tahun 1995, pendapatan bunga atas dana yang disalurkan adalah sebesar Rp. 138,47 miliar, dan pada tahun 1996 meningkat 22,06% menjadi Rp. 169,0 miliar, yang mana sejalan dengan pertumbuhan volume aktiva produktif. Pada tahun 1997 pendapat bunga meningkat 46,16% menjadi Rp. 247,02 miliar, sedangkan per tanggal 31 Agustus 1998 pendapatan bunganya mencapai Rp. 412,09 miliar, yang mana kenaikan-kenaikan tersebut diakibatkan oleh meningkatnya volume usaha maupun tingkat suku bunga.

Bila dilihat besarnya kontribusi pendapatan bunga terhadap total pendapatan operasional dari tahun 1995 - 31 Agustus 1998, masing-masing adalah 94,3%; 94,3%; 88,7%; 97,2%.

Beban Bunga

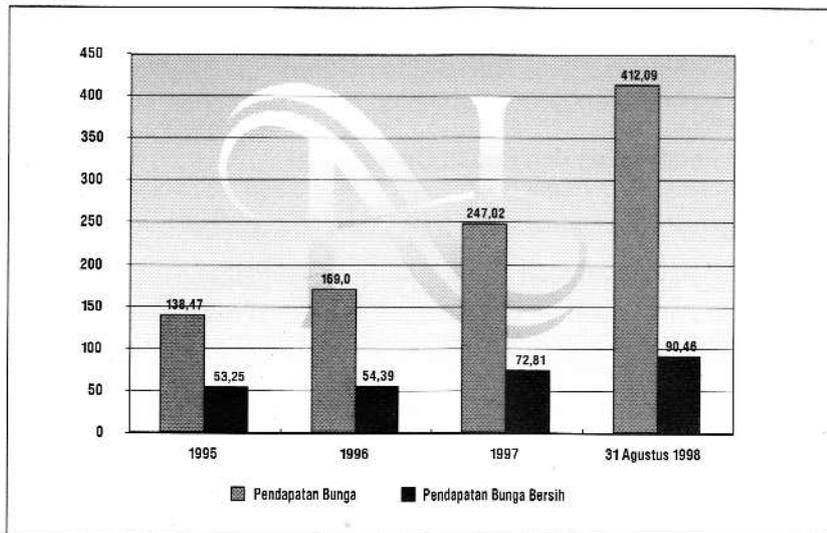
Pada tahun 1995, beban bunga atas dana yang dihimpun adalah Rp. 85,21 miliar, sedangkan ditahun 1996 beban bunga meningkat 34,50% menjadi Rp. 114,61 miliar sejalan dengan pertumbuhan volume usaha. Pada tahun 1997 terdapat peningkatan sebesar 51,99% sehingga beban bunga menjadi Rp. 174,20 miliar. Per tanggal 31 Agustus 1998 beban bunga telah mencapai Rp. 321,62 miliar. Peningkatan diakhir tahun 1997 dan Agustus 1998 merupakan akibat dari meningkatnya volume usaha dan naiknya tingkat suku bunga.

Masih sangat terjaganya kondisi likuiditas Perseroan sebagaimana ditunjukkan oleh tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) per 31 Agustus 1998 sebesar 45,28%, memberikan kontribusi terhadap pendapatan bunga Perseroan yang dihasilkan dari pelepasan kelebihan likuiditas kedalam transaksi pasar uang antar bank serta penempatan pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dimana tingkat suku bunga callmoney antar bank dan SBI ditahun 1998 ini terbilang masih sangat tinggi. Sementara disisi beban bunga juga turut mengalami peningkatan, karena kelangkaan likuiditas yang dialami oleh perbankan Indonesia secara umum mendorong terciptanya kondisi tingginya biaya dana. Hal ini tercermin pada tingginya tingkat suku bunga deposito berjangka waktu satu bulan yang dijamin oleh Pemerintah dalam program penjaminan, dimana bahkan pernah mencapai level hingga 67%.

Pendapatan Bunga Bersih

Pada tahun 1995, Perseroan berhasil memperoleh pendapatan bunga bersih sebesar Rp. 53,25 miliar. Di tahun 1996 meningkat 2,14% menjadi Rp. 54,39 miliar. Pertumbuhan yang marginal ditahun 1996 disebabkan oleh beban bunga yang meningkat lebih cepat dari pertumbuhan pendapatan bunga. Pada tahun 1997, terdapat peningkatan sebesar 33,86% sehingga pendapatan bunga bersihnya menjadi Rp. 72,81 miliar. Per tanggal 31 Agustus 1998, Perseroan mencatat pendapatan bunga bersih sebesar Rp. 90,46 miliar. Peningkatan tersebut seiring dengan meningkatnya volume usaha.

**GRAFIK PERTUMBUHAN PENDAPATAN BUNGA
TAHUN 1995 - 1997**

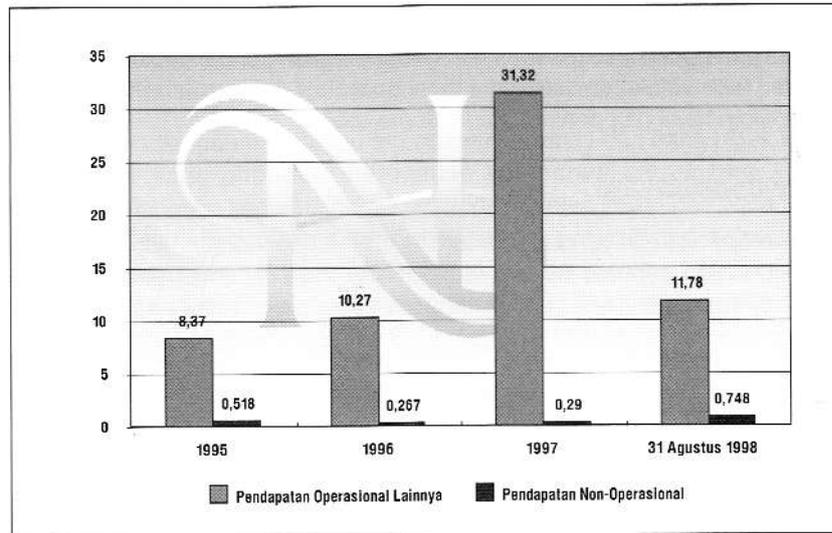


Pendapatan Operasional Lainnya

Komponen dari pendapatan operasional lainnya adalah provisi dan komisi yang diterima selain dari pemberian kredit dan pendapatan (operasional) lainnya. Pada tahun 1995, pendapatan operasional lainnya sebesar Rp. 8,37 miliar dan di tahun 1996 meningkat 22,73% menjadi Rp. 10,27 miliar. Pada tahun 1997 meningkat 204,78% menjadi Rp. 31,32 miliar. Per tanggal 31 Agustus 1998 pendapatan operasional lainnya mencapai Rp. 11,78 miliar. Peningkatan yang tinggi ditahun 1997 terutama diperoleh dari transaksi valuta asing.

Secara umum peningkatan bunga maupun provisi dan komisi kredit terutama dihasilkan dari peningkatan pinjaman yang diberikan dari tahun 1995 - 1997 yaitu Rp. 709,09 miliar pada tahun 1995, Rp. 866,85 miliar pada tahun 1996 dan Rp. 1.152,75 miliar pada tahun 1997. Terhitung mulai dari triwulan IV tahun 1997 sampai dengan akhir Agustus 1998, yang mana ditandai dengan adanya krisis ekonomi yang berdampak terhadap semua sektor, maka peningkatan pendapatan bunga yang diperoleh Perseroan lebih dikarenakan berasal dari penempatan jangka pendek di pasar uang ataupun penempatan pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Per 31 Agustus 1998 jumlah penempatan pada pasar uang dan SBI mencapai Rp. 1.106,45 miliar.

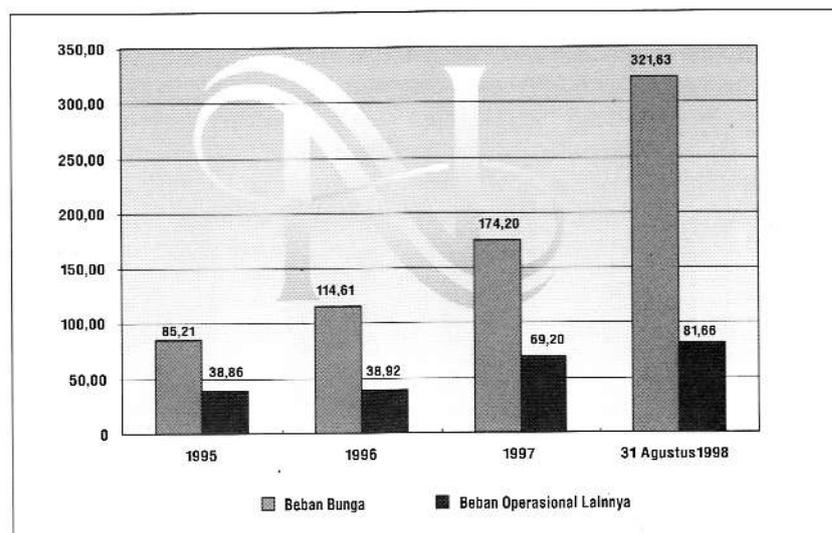
**GRAFIK PERTUMBUHAN PENDAPATAN NON-BUNGA
TAHUN 1995 - 1997**



Beban Operasional Lainnya

Beban operasional lainnya adalah beban diluar beban bunga yang meliputi biaya tenaga kerja, biaya umum dan administrasi, biaya penyisihan aktiva produktif dan biaya lainnya berkenaan dengan operasional bank. Pada tahun 1995 beban operasional lainnya sebesar Rp. 38,86 miliar meningkat 0,14% menjadi Rp. 38,92 miliar ditahun 1996 dan meningkat 77,83% menjadi Rp. 69,20 miliar ditahun 1997. Peningkatan yang pesat ditahun 1997 dan 1998 disebabkan oleh peningkatan pada pos biaya penghapusan aktiva produktif dan biaya-biaya sehubungan dengan peningkatan jaringan kantor. Per 31 Agustus 1998, Perseroan mencatat beban operasional lainnya sebesar Rp. 81,65 miliar.

GRAFIK PERTUMBUHAN BEBAN OPERASIONAL TAHUN 1995 - 1997



Laba Operasional

Laba Operasional di tahun 1995 tercatat sebesar Rp. 22,76 miliar. Pada tahun 1996, Perseroan membukukan laba operasional sebesar Rp. 25,76 miliar meningkat 13,14% dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 1995. Tahun 1997, laba operasional Perseroan mencapai Rp. 34,93 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 35,61% dibandingkan dengan laba operasional tahun 1996. Per 31 Agustus 1998, laba operasionalnya mencapai Rp. 20,59 miliar. Peningkatan-peningkatan tersebut merupakan hasil dari peningkatan volume usaha.

Pendapatan Non-Operasional

Pendapatan non-operasional yang antara lain diperoleh dari keuntungan karena penjualan aktiva tetap, pada tahun 1995 sebesar Rp. 0,518 miliar. Di tahun 1996 mengalami penurunan sebesar 48,47% menjadi Rp. 0,267 miliar. Pendapatan non-operasional pada tahun 1997 sebesar Rp. 0,290 miliar dan per tanggal 31 Agustus 1998 sebesar Rp. 0,748 miliar.

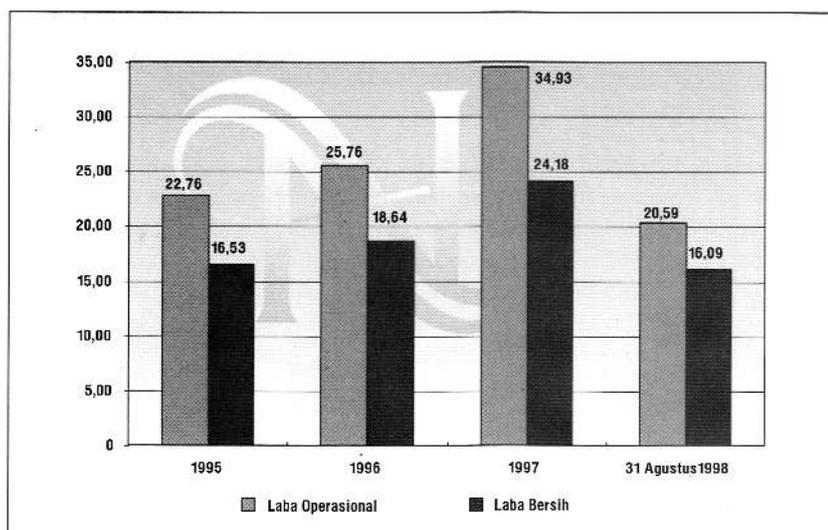
Beban Non-Operasional

Beban non-operasional pada tahun 1995 sebesar Rp. 0,259 miliar. Tahun 1996 mengalami penurunan sebesar 10,72% menjadi Rp. 0,231 miliar, sementara ditahun 1997 mengalami peningkatan sebesar 436,94% menjadi Rp. 1,242 miliar. Per 31 Agustus 1998, Perseroan membukukan beban non-operasional sebesar Rp. 0,411 miliar. Peningkatan yang cukup tinggi pada beban non-operasional ditahun 1997 disebabkan oleh kewajiban pembayaran ke Yayasan Dana Sosial Mandiri.

Laba Bersih

Laba bersih pada tahun 1995 sebesar Rp. 16,53 miliar, sedangkan ditahun 1996 meningkat 12,76% menjadi Rp.18,64 miliar. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya efisiensi operasional yang tercermin dari stabilnya beban operasional yang diimbangi dengan peningkatan secara berarti pada pendapatan operasional. Pada tahun 1997, laba bersih mengalami peningkatan sebesar 29,75% menjadi Rp. 24,18 miliar. Per 31 Agustus 1998 Perseroan telah mencapai laba bersih sebesar Rp. 16,09 miliar.

**GRAFIK PERTUMBUHAN LABA OPERASIONAL DAN LABA BERSIH
TAHUN 1995 - 1997**



2.2 Pertumbuhan Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas

Peningkatan volume usaha yang dicapai Perseroan terlihat dari peningkatan total aktiva dari tahun-ketahun yang mana sejalan dengan peningkatan jumlah aktiva produktif yang disalurkan Perseroan. Total aktiva pada tahun 1995 sebesar Rp. 875,31 miliar. Ditahun 1996 meningkat 36,97% menjadi Rp. 1.198,93 miliar, dan tahun 1997 meningkat 42,10% menjadi Rp. 1.703,67 miliar. Per 31 Agustus 1998, Perseroan mencatat total aktiva sebesar Rp. 2.878,34 miliar.

Total kewajiban dengan komponen terbesarnya berasal dari dana pihak ketiga (masyarakat) dan pinjaman yang diterima, merupakan komponen utama bagi Perseroan didalam menyalurkan dananya kedalam aktiva produktif. Jumlah kewajiban pada tahun 1995 sebesar Rp. 759,63 miliar. Pada tahun 1996 mengalami peningkatan sebesar 40,97% menjadi Rp.1.070,86 miliar dan selanjutnya ditahun 1997 meningkat 42,93% menjadi Rp. 1.530,59 miliar. Per 31 Agustus 1998, Perseroan mencatat total kewajiban sebesar Rp. 2.699,86 miliar.

Meningkatnya dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun Perseroan sepanjang tahun 1998 ini menunjukkan masih sangat terjaganya kepercayaan masyarakat, sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan yang pesat pada total aktiva Perseroan.

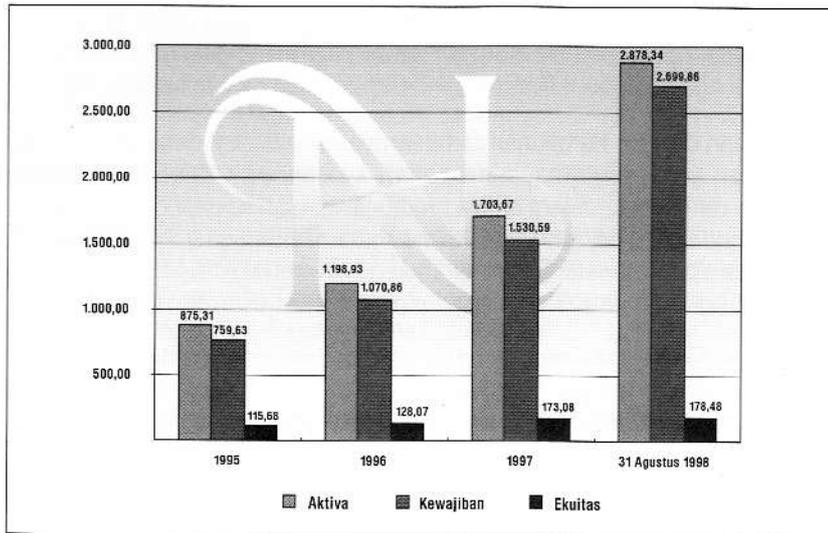
Disamping itu peningkatan total aktiva per 31 Agustus 1998 sebesar 69% dibandingkan dengan posisi akhir tahun 1997 juga tidak terlepas dari pengaruh faktor melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Bila unsur depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing diabaikan, maka kenaikan real aktiva Perseroan per 31 Agustus 1998 dibandingkan dengan posisi akhir tahun 1997 hanyalah sebesar 44%.

Total ekuitas Perseroan ditahun 1995 sebesar Rp. 115,68 miliar dengan rincian : modal disetor sebesar Rp. 62,5 miliar, agio sebesar Rp. 26,25 miliar dan laba ditahan sebesar Rp. 26,93 miliar. Pada tahun 1996 total ekuitasnya mencapai Rp.128,07 miliar dengan rincian modal disetor Rp. 62,5 miliar, agio sebesar Rp. 26,25 miliar dan laba ditahan sebesar Rp. 39,32 miliar, yang mana mengalami peningkatan sebesar 46,0% dibandingkan dengan laba ditahan tahun 1995.

Pada tahun 1997, total ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar 35,15% menjadi Rp. 173,08 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh dilaksanakannya revaluasi aktiva tetap, sehingga membukukan selisih penilaian kembali aktiva tetap sebesar Rp. 26,95 miliar. Selain itu modal disetor juga mengalami peningkatan sebesar 40% sehingga nilainya menjadi Rp 87,5 miliar. Hal ini disebabkan oleh adanya pembagian saham bonus dengan ketentuan rasio 5 saham lama : 2 saham baru, sehingga menghasilkan peningkatan modal disetor sebesar Rp 25 milyar. Pembayaran saham bonus ini dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 1997. Dengan adanya pembagian saham bonus ini maka nilai agio mengalami penurunan sebesar nilai dari saham bonus tersebut, sehingga pada tahun 1997 jumlah agionya menjadi Rp. 1,25 miliar. Disamping itu pada tanggal 3 Februari 1997, Perseroan melakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp. 1.000,- per lembar saham menjadi Rp. 500,- (*stock split*), sehingga jumlah modal disetor Perseroan meningkat dari 62,5 juta lembar saham menjadi 175 juta lembar saham. Sementara itu, laba ditahan mengalami peningkatan sebesar 45,93% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga pada tahun 1997 laba ditahan Perseroan mencapai Rp. 57,37 miliar.

Per 31 Agustus 1998, total ekuitas mencapai Rp. 178,48 miliar, yang terdiri dari modal disetor sebesar Rp. 87,5 miliar, agio sebesar Rp. 1,25 miliar, selisih penilaian kembali aktiva tetap sebesar Rp. 27,69 miliar dan laba ditahan sebesar Rp. 62,04 miliar.

**GRAFIK PERTUMBUHAN AKTIVA, KEWAJIBAN DAN EKUITAS
TAHUN 1995 - 1997**



2.3 Pertumbuhan Aktiva dan Kewajiban dalam valuta asing

Berikut adalah tabel pertumbuhan aktiva dan kewajiban dalam valuta asing beserta rekening administratifnya dalam valuta asing :

(dalam jutaan rupiah)

	1993	1994	1995	1996	1997	31 Agt 1998
Aktiva	61.449	63.539	128.519	201.370	481.616	733.904
Pasiva	68.566	83.684	144.151	203.509	455.989	715.788
Aktiva Rekening Administratif	8.044	43.966	30.992	38.584	13.367	910
Pasiva Rekening Administratif	7.833	43.966	30.992	39.322	7.937	9.768
Posisi Devisa Netto (PDN)	(6.906)	(20.145)	(15.632)	(2.877)	31.057	9.258

Posisi aktiva dalam valuta asing per 31 Desember 1995 sampai dengan 31 Agustus 1998 masing masing meningkat sebesar 56,69%; 139,17% dan 52,38 %.

Pada tahun 1995 kewajiban dalam valuta asing sebesar Rp. 144.151 juta. Tahun 1996 kewajiban dalam valuta asing meningkat 41,18% menjadi Rp. 203.509 juta, dan pada tahun 1997 meningkat 124,06% menjadi Rp. 455.989 juta. Per 31 Agustus 1998 jumlah kewajiban dalam valuta asingnya sebesar Rp. 715.788 juta.

Peningkatan yang pesat pada tahun 1997 dan 1998 disebabkan oleh faktor kurs yang meningkat cukup tajam, sebagaimana terlihat pada pergerakan nilai kurs US\$ secara berturut-turut adalah Rp. 2.308,- diakhir 1995, Rp. 2.383,- diakhir tahun 1996, Rp. 4.650,- diakhir tahun 1997 dan mencapai Rp. 11.075,- pada akhir Agustus 1998.

Apabila diasumsikan, digunakannya nilai kurs USD yang sama seperti posisi akhir tahun 1997, yaitu sebesar Rp. 4.650,- (dalam arti tidak memperhitungkan faktor depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing), maka aktiva dan pasiva dalam valuta asing per 31 Agustus 1998 dibandingkan posisi akhir tahun 1997 mengalami penurunan masing-masing sebesar 36% dan 34% . Hal ini dilakukan Perseroan untuk memperbaiki struktur currency gap serta mengurangi risiko yang diakibatkan oleh gejolak nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Posisi PDN dari tahun 1995 - 31 Agustus 1998 masing-masing adalah 13,45% ditahun 1995; 1,85% ditahun 1996; 13,94% ditahun 1997 dan pada akhir Agustus 1998 adalah 4,81%. PDN ini masih berada dalam batas ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2.4 Imbal Hasil

Meningkatnya total aktiva dan ekuitas Perseroan sebagaimana telah diuraikan dalam point-point terdahulu, tidak diimbangi oleh peningkatan yang sebanding dengan laba bersih yang dicapai Perseroan sehingga rasio imbal hasil terhadap aktiva dan ekuitas ditahun 1998 tampak mengecil dibandingkan dengan tahun 1997.

Memburuknya kondisi ekonomi, yang dapat berakibat kepada meningkatnya kredit bermasalah, diantisipasi oleh Perseroan dengan membentuk cadangan aktiva produktif yang tinggi, sehingga sampai dengan akhir Agustus 1998 biaya penyisihan aktiva produktif meningkat 168,6 % dibandingkan biaya penyisihan aktiva produktif tahun 1997. Hal inilah yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pencapaian laba bersih Perseroan, sehingga apabila perolehan laba bersih Perseroan per 31 Agustus 1998 dibandingkan posisi akhir tahun 1997, namun tanpa memperhitungkan biaya penyisihan penghapusan aktiva produktif, ternyata laba bersih yang dicapai Perseroan per 31 Agustus 1998 mengalami kenaikan sebesar 43%.

Imbal hasil terhadap ekuitas rata-rata (Return on Average Equity - ROAE) untuk tahun 1995 sampai dengan 31 Agustus 1998 berturut-turut sebagai berikut : 15,16%; 15,29%; 16,06%; 15,44%.

Pada tahun 1997, terlihat imbal hasil yang mengalami sedikit kenaikan sejalan dengan meningkatnya laba bersih Perseroan dari Rp. 18,64 miliar yang dicapai pada tahun 1996 meningkat 29,75% menjadi Rp. 24,18 miliar ditahun 1997. Per 31 Agustus 1998, Perseroan telah mencapai laba bersih sebesar Rp. 16,09 miliar.

Sedangkan imbal hasil terhadap aktiva rata-rata (Return on Average Assets - ROAA) untuk tahun 1995 sampai dengan 31 Agustus 1998 masing-masing tercatat : 2,16%; 1,8%; 1,66%; 1,11%. Penurunan ini terjadi karena faktor melemahnya nilai tukar Rupiah dimana hal ini mengakibatkan peningkatan total aktiva jauh melebihi dari kenaikan laba bersih.

2.5 Likuiditas

Perseroan selalu memenuhi ketentuan Giro Wajib Minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dimana sejak bulan April 1997 hingga saat ini, Bank Indonesia menetapkan besarnya Giro Wajib Minimum sebesar 5% untuk Rupiah, dan 3% untuk valuta asing.

Sangat terjaganya kondisi likuiditas Perseroan ditunjukkan oleh perannya dipasar uang antar bank sebagai net lender (pemberi pinjaman). Disamping itu Perseroan juga menempatkan kelebihan likuiditasnya pada SBI.

Posisi likuiditas dalam bentuk kas, giro, penempatan antar bank dan surat berharga pada tahun 1995 sampai dengan tanggal 31 Agustus 1998 secara berturut-turut adalah : Rp. 95,1 miliar, Rp. 204,9 miliar, Rp. 346,3 miliar dan Rp. 1.434,4 miliar.

2.6. Solvabilitas

Perseroan selalu menjaga rasio LDR-nya (Loan to Deposit Ratio) senantiasa berada dalam batas-batas yang sehat menurut ketentuan Bank Indonesia, dimana nilai maksimum menurut ketentuan adalah 115%. Dalam kurun waktu dari tahun 1995 sampai dengan 31 Desember 1997, rasio LDR Perseroan sebesar 87,54%; 79,20% dan 75,38%.

Ditahun 1998 ini, Perseroan lebih berhati-hati dalam menyalurkan dananya, dimana kelebihan likuiditasnya lebih banyak ditempatkan kedalam SBI dan penempatan jangka pendek lainnya, sehingga LDR per 31 Agustus 1998 turun menjadi 45,28 %.

2.7. Kondisi Keuangan Terakhir Per Tanggal 31 Oktober 1998 (UNAUDITED)

Dibandingkan dengan posisi per 31 Agustus 1998, total aktiva Perseroan mengalami penurunan nilai, dari Rp. 2.878,3 miliar per 31 Agustus 1998 menjadi Rp. 2.697,8 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh faktor perubahan yang cukup tajam antara nilai tukar per 31 Agustus 1998 dimana nilai kurs 1 USD = Rp. 11.075, sementara per 31 Oktober nilai kurs 1 USD = Rp. 7.550,-. Apabila diambil patokan kurs yang sama, yaitu mengacu kepada nilai kurs per 31 Agustus 1998, maka pertumbuhan real total aktiva per 31 Oktober 1998 dibandingkan dengan posisi 31 Agustus 1998 adalah sebesar 2%, sehingga relatif tidak terjadi perubahan secara berarti.

Total penyaluran kredit (bruto) sebesar Rp.1.047,1 miliar, dengan jumlah cadangan penghapusan kredit mencapai Rp. 63 miliar, atau naik 6,83% dibandingkan dengan posisi 31 Agustus 1998. Apabila faktor nilai tukar diabaikan, maka total kredit (bruto) sesungguhnya mengalami sedikit penurunan, yaitu sebesar 3%.

Total penghimpunan dana pihak ketiga sebesar Rp. 1.819,9 miliar. Disamping dana pihak ketiga, sumber dana non-tradisional yang dihimpun Perseroan berasal dari emisi Obligasi Bank NISP I senilai Rp. 150 miliar dan pinjaman yang diterima sebesar Rp. 417,9 miliar, sehingga secara keseluruhan, total penghimpunan dana yang dihimpun oleh Perseroan per 31 Oktober 1998 sebesar Rp. 2.387,9 miliar.

Total ekuitas mengalami kenaikan, sehingga mencapai nilai Rp. 184,2 miliar. Kenaikan tersebut ditunjang oleh peningkatan laba ditahan dari Rp. 62,0 miliar yang dicapai pada 31 Agustus 1998, meningkat menjadi Rp. 77,7 miliar per posisi 31 Oktober 1998.

Perseroan mencatat kenaikan pendapatan bunga bersih sebesar Rp. 27 miliar atau meningkat 30% dibandingkan dengan posisi per 31 Agustus 1998 yang sebesar Rp. 90,46 miliar, sehingga per tanggal 31 Oktober 1998 Perseroan berhasil membukukan pendapatan bunga bersih sebesar Rp. 117,4 miliar.

Kenaikan pendapatan bunga tersebut memberikan kontribusi terhadap kenaikan laba bersih Perseroan, sehingga Perseroan berhasil mencapai kenaikan laba bersih dari Rp.16,09 miliar per 31 Agustus 1998 menjadi Rp. 20,38 miliar per akhir Oktober 1998. Perseroan optimis bahwa perolehan laba bersih ini akan meningkat lagi pada 2 bulan terakhir, sehingga diperkirakan akan mampu meraih laba bersih sebesar \pm Rp. 25 miliar pada akhir tahun buku 1998.

3. PROSPEK USAHA

Perseroan yang didirikan di kota Bandung sejak tahun 1941, telah mengakar kuat di daerah Jawa Barat, sehingga wilayah Jawa Barat saat ini masih menjadi obyek pemasaran utama. Namun seiring dengan perubahan menuju ke ekonomi pasar bebas, maka jaringan yang lebih luas akan terus dikembangkan, dan Perseroan bermaksud untuk terus memperluas jaringan usahanya kewilayah Jabotabek, Jawa Tengah, Jawa Timur dan luar Jawa.

Kondisi umum Perbankan Nasional sendiri saat ini kurang baik. Krisis kepercayaan terhadap perbankan nasional yang berawal dari ditempuhnya langkah pencabutan izin 16 bank umum pada tanggal 1 November 1997. Kebijakan ini ternyata menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat dimana menimbulkan gelombang pemindahan simpanan secara besar-besaran dari lembaga perbankan yang kurang sehat ke lembaga perbankan yang lebih sehat. Turunnya kepercayaan internasional terhadap perbankan nasional juga menimbulkan akibat penolakan atas L/C yang diterbitkan perbankan nasional oleh perbankan asing.

Keadaan ini pada akhirnya menciptakan kondisi kelangkaan likuiditas dipasaran, sehingga berdampak terhadap kenaikan suku bunga serta terjadinya kemerosotan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing hingga mencapai level diluar prediksi semua pihak. Hal ini pada akhirnya memukul dunia perbankan karena munculnya persoalan kredit bermasalah dapat mengganggu kesehatan bank.

Bank NISP yang berdiri sejak tahun 1941, dalam perjalanan usahanya telah melampaui beberapa masa krisis. Yang membuat Perseroan tetap bertahan dalam badai krisis perekonomian saat ini adalah berkat dipegang teguhnya prinsip kehati-hatian serta senantiasa menempatkan kesehatan bank sebagai prioritas utama.

Dalam menghadapi krisis perekonomian saat ini, dimana kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional menjadi rapuh, Perseroan berjaga-jaga dengan melakukan penempatan dananya pada penempatan jangka pendek SBI dan penempatan pasar uang lainnya, sehingga kondisi likuiditas Perseroan senantiasa terjaga.

Sedangkan dalam menghadapi risiko kredit bermasalah, Perseroan telah berupaya melakukan restrukturisasi kredit dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Risiko yang akan dihadapi Perseroan dari dampak krisis ekonomi tersebut adalah meningkatnya kualitas aktiva yang tidak produktif, oleh karenanya diperlukan pembentukan cadangan yang tinggi untuk menanggulangi risiko kerugian tersebut namun tidak sampai menurunkan perolehan laba bersih Perseroan. Hal mana telah mulai dilakukan oleh Perseroan sejak awal tahun 1998 ini.

Upaya yang dilakukan Perseroan didalam menjaga kualitas aktivitya, yaitu dengan cara :

- Secara proaktif memelihara semua kredit yang disalurkan.
- Mengintensifkan pemeliharaan kredit serta mengantisipasi munculnya kredit yang bisa menjadi masalah.
- Mengintensifkan upaya penagihan langsung maupun restrukturisasi kredit bermasalah.

Kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam rangka Penyehatan Perbankan mempunyai dampak yang luar biasa terhadap seluruh bank di Indonesia, demikian juga halnya dengan Perseroan. Disatu sisi Perseroan melihatnya sebagai tantangan besar untuk lebih meningkatkan profesionalisme dan prinsip kehati-hatian bank, namun di lain sisi dilihatnya sebagai peluang untuk meraih pangsa pasar yang lebih besar dengan terjadinya pergeseran signifikan dari pangsa pasar perbankan nasional.

Dari segi target pasar, Bank NISP masih tetap berkeyakinan bahwa sesuai dengan pengalaman dan pemahamannya terhadap pangsa pasar ritel yang ditanganinya selama ini, maka sektor tersebut masih menjadi pangsa pasar utama dari Perseroan. Didukung pula oleh kenyataan, bahwa dimasa sulit yang saat ini tengah dialami oleh dunia usaha, telah membuktikan bahwa sektor tersebutlah yang praktis masih mampu bertahan bahkan berpotensi untuk terus berkembang. Namun demikian, untuk meningkatkan daya saing Perseroan di era globalisasi, maka Perseroan senantiasa mencari peluang untuk menggarap segmen lainnya diluar ritel.

Era globalisasi yang akan segera berlangsung, mengharuskan Perseroan tetap kompetitif dan dapat terus bertahan dalam menjalankan usahanya, oleh karenanya Perseroan memandang perlu untuk mengadakan penambahan modal.

Visi Perseroan adalah terus berusaha menjadi salah satu lembaga keuangan terbaik dan terbesar yang memiliki dasar yang kuat dengan kualitas dan pelayanan bertaraf internasional.

V. RISIKO USAHA

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang mungkin dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan, apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Beberapa risiko yang diperkirakan dapat mempengaruhi usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

RISIKO KREDIT

Bagian terbesar dari aktiva yang dimiliki oleh Perseroan sebagai suatu bank adalah berupa kredit yang diberikan kepada para nasabahnya. Risiko kredit dapat timbul apabila kelancaran pembayaran kembali pokok pinjaman dan/atau bunga pinjaman mengalami gangguan. Apabila jumlah kredit yang tidak dapat dikembalikan cukup material maka dapat menurunkan Perseroan dalam memperoleh laba dan kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan.

RISIKO EKONOMI

Kondisi perbankan domestik tidak terlepas dari pengaruh perekonomian nasional dan internasional. Risiko ekonomi dapat timbul apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan sehingga dapat mempengaruhi seluruh kegiatan usaha Perseroan, baik dalam penghimpunan dana maupun pemberian kredit, pengembalian pokok kredit dan bunganya, serta aktivitas lainnya yang pada akhirnya dapat menurunkan kemampuan Perseroan dalam memperoleh laba.

RISIKO LIKUIDITAS

Sebagian besar pendanaan Perseroan berasal dari dana masyarakat yang relatif bersifat jangka pendek, sedangkan kredit yang diberikan memiliki jangka waktu yang relatif lebih panjang. Perbedaan jangka waktu tersebut harus dikelola dengan baik. Ketidaksiharian antara jangka waktu penghimpunan dana dari masyarakat dan jangka waktu penempatan dana dapat menyulitkan Perseroan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya.

RISIKO KECUKUPAN PENYISIHAN PENGHAPUSBUKUAN KREDIT

Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina seluruh bank di Indonesia mensyaratkan adanya pembentukan penyisihan penghapusbukuan kredit sesuai dengan kategori kredit yang diberikan oleh Perseroan seperti lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Ketidakmampuan membentuk penyisihan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan-ketentuan Bank Indonesia, akan menurunkan tingkat kesehatan Perseroan dan pengembangan usaha Perseroan.

RISIKO KECUKUPAN MODAL

Menurut peraturan Pemerintah terakhir Bank diwajibkan untuk menyediakan modal minimum (Capital Adequacy ratio) sebesar 4% pada akhir tahun 1998, 8% pada akhir tahun 1999, dan 10% pada akhir tahun 2000. Ketidakmampuan memenuhi resiko kecukupan modal tersebut akan menurunkan tingkat kesehatan bank.

RISIKO TINGKAT BUNGA

Risiko Tingkat Bunga adalah risiko kemungkinan turunnya pendapatan bunga bersih dan nilai pasar portfolio aktiva akibat perubahan tingkat bunga di pasar uang. Komposisi portfolio termasuk instrumen aktiva, pasiva dan rekening administratif cukup sensitif terhadap tingkat bunga. Karena aktiva dan

pasiva seperti deposito pada bank lain, investasi dalam surat berharga, pinjaman, deposito berjangka, pinjaman jangka panjang dan kewajiban-kewajiban pasar uang lainnya, memiliki berbagai tingkat bunga dan jangka waktu, maka perubahan-perubahan pada tingkat bunga dapat mengakibatkan kenaikan atau penurunan pendapatan bunga bersih.

RISIKO PERSAINGAN

Pergeseran peta perbankan di Indonesia tidak berarti menurunnya tingkat persaingan bank-bank di Indonesia, namun sebaliknya akan meningkatkan persaingan sehat di antara bank-bank yang mampu bertahan dengan cara pembukaan kantor-kantor baru, penciptaan produk-produk yang menarik, persaingan suku bunga, maupun peningkatan pelayanan kepada nasabah. Banyak dari bank-bank tersebut bersaing untuk memperoleh nasabah yang sama dengan Perseroan. Dengan demikian, terdapat ketidakpastian Perseroan akan dapat meningkatkan atau mempertahankan besarnya portfolio simpanan, kredit, maupun pangsa pasarnya di masa yang akan datang akibat ketatnya persaingan yang terjadi, yang pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan Perseroan.

RISIKO OPERASIONAL

Perseroan dapat dihadapkan pada risiko operasional yang disebabkan oleh lemahnya fungsi pengawasan intern dan tidak efektifnya sistem prosedur operasional. Sistem dan teknologi yang tidak mendukung akan mengganggu kelancaran operasional dan mutu pelayanan kepada nasabah juga akan menurun, sehingga pada akhirnya akan memperkecil laba yang diperoleh Perseroan.

RISIKO KURS VALUTA ASING

Sebagai salah satu bank devisa, transaksi Perseroan tidak terlepas dari fluktuasi mata uang asing baik dari sisi aktiva maupun dari sisi kewajiban. Nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, sehingga apabila Perseroan memiliki posisi mata uang asing yang kurang menguntungkan dapat menimbulkan kerugian yang berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan.

RISIKO PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Industri perbankan memperoleh pengawasan yang cukup ketat dari Pemerintah karena kegiatan-kegiatannya banyak menyangkut kepentingan umum. Pengawasan yang ketat tersebut tercermin dari cukup banyaknya peraturan-peraturan Pemerintah mengenai perbankan yang terus menerus diperbaharui dari waktu ke waktu. Dikeluarkannya peraturan baru seringkali akan membawa dampak yang tidak kecil bagi Perseroan karena menuntut dilakukannya perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian akan cara dan pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan. Keterlambatan dalam mengantisipasi berbagai kebijakan Pemerintah tersebut akan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat menurunkan kinerja yang ditargetkan.

RISIKO INDUSTRI PERBANKAN SEHUBUNGAN DENGAN KRISIS EKONOMI

Didalam situasi perekonomian yang memburuk saat ini, perbankan dihadapkan kepada kondisi meningkatnya rata-rata suku bunga yang berakibat terciptanya kondisi "negative spread". Disamping itu kondisi saat ini dimana masih belum tercapainya stabilitas nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, memberikan pengaruh sangat besar terhadap ketidakmampuan debitur mengembalikan kredit dalam valuta asing yang diperolehnya dari bank, sehingga berakibat kepada meningkatnya tingkat kredit bermasalah yang akhirnya menurunkan kualitas aktiva produktif Perseroan. Untuk menanggulangi risiko ini Perseroan terus menerus meningkatkan aktivitas pemeliharaan kredit serta membentuk cadangan yang tinggi. Kondisi negative spread dan kebutuhan untuk membentuk cadangan penyesuaian bagi penghapusan aktiva produktif pada akhirnya mempengaruhi kemampuan Perseroan didalam menghasilkan laba.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pada tanggal 3 Desember 1998, Perseroan melaksanakan pembagian saham bonus, dividen saham dan dividen tunai yang merupakan hasil dari keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 29 Juni 1998. Dengan adanya pembagian saham bonus dan dividen saham maka modal disetor Perseroan meningkat dari 175.000.000 lembar saham senilai Rp. 87.500.000.000,- menjadi 295.750.000 lembar saham senilai Rp. 147.875.000.000,-.

Rincian dari pelaksanaan pembagian saham bonus, dividen saham dan dividen tunai adalah sebagai berikut :

- Membagikan saham bonus senilai Rp. 28.875.000.000,- yang berasal dari kapitalisasi sisa agio saham yang merupakan hasil dari Penawaran Umum tahun 1994 sebesar Rp. 1.188.787.740,- dan selisih penilaian kembali aktiva tetap sebesar Rp. 27.686.212.260,- dengan ketentuan setiap pemegang 100 saham lama berhak memperoleh 33 saham bonus.
- Membagikan dividen saham senilai Rp. 45.675.000.000,- yang berasal dari laba bersih tahun buku 1997 sebesar Rp. 12.483.664.681,- dan sebesar Rp. 33.191.335.319,- berasal dari laba ditahan sampai dengan tahun buku 1996. Ketentuan rasio dividen saham : setiap pemegang 25 saham berhak memperoleh 9 dividen saham, dengan dasar perhitungan harga penutupan saham Perseroan pada tanggal 29 Juni 1998 pukul 12:00 bbwi sebesar Rp. 725,-. Nilai nominal dividen saham yang dibagikan sebesar Rp. 31.500.000.000,- dan agio yang terbentuk dari dividen saham sebesar Rp. 14.175.000.000,-. Pembayaran pajak atas dividen saham dibayarkan dari dividen tunai tahun 1997.
- Membagikan dividen tunai yang berasal dari laba bersih tahun buku 1997 sebesar Rp. 11.418.750.000,- atau Rp. 65,25 untuk setiap lembar saham.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Riwayat singkat Perseroan dari saat berdiri pada tahun 1941 sampai dengan Penerbitan Obligasi I tahun 1997 telah disajikan dalam Prospektus Penawaran Umum Saham dan Propektus Obligasi I yang diterbitkan berturut-turut pada tanggal 22 September 1994 dan 29 Mei 1997, dapat dilihat pada Sub-Judul Riwayat Singkat Perseroan.

Selanjutnya, Perseroan memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Keputusan No. D.15.6.2.27 tanggal 20 Juli 1967, ijin sebagai bank devisa dengan Keputusan Bank Indonesia No. 23/9/KEP/DIR tanggal 19 Mei 1990, dan ijin sebagai bank persepsi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Keputusan No. S.35/MK.03/1993 tanggal 6 Januari 1993.

Setelah Penerbitan Obligasi I pada tahun 1997, perubahan Anggaran Dasar Perseroan adalah mengenai (a) Peningkatan modal dasar Perseroan dan (b) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturannya.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Sampai dengan Penerbitan Obligasi I pada tahun 1997, perkembangan kepemilikan saham Perseroan telah diuraikan dalam Prospektus Penerbitan Obligasi I yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 1997. Setelah Penerbitan Obligasi I tersebut, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 1998 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Suryasono Sentosa	58.555.000	29.277.500.000	33,46
2. PT Udayawira Utama	58.555.000	29.277.500.000	33,46
3. Karmaka Surjaudaja	140.000	70.000.000	0,08
4. Masyarakat	57.750.000	28.875.000.000	33,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	175.000.000	87.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	825.000.000	412.500.000.000	

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, pada tanggal 29 Juni 1998, Perseroan telah melakukan RUPSLB yang menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp. 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) menjadi Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 95 tanggal 29 Juni 1998, dibuat oleh Ny. Indah Fatmawati, S.H, pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-10.358 HT.01.04:Th.98, tanggal 5 Agustus 1998 telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan nomor TDP.10111800142 dan nomor Agenda Pendaftaran: 19.1/BH.10.11/VIII/98 tanggal 20 Agustus 1998 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 23 Oktober 1998, Tambahan No. 5932.

Pada RULBPS tanggal 29 Juni 1998 juga telah disetujui untuk membagikan saham bonus dan dividen saham. Saham bonus senilai Rp. 28.875.000.000 yang berasal dari kapitalisasi agio saham yang merupakan hasil Penawaran Umum tahun 1994 sebesar Rp. 1.188.787.740 dan selisih penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap sebesar Rp. 27.686.212.260. Ketentuan rasio saham bonus : setiap pemegang 100 saham lama berhak memperoleh 33 saham bonus. Dividen saham senilai Rp. 45.675.000.000 yang berasal dari laba bersih tahun 1997 sebesar Rp. 12.483.664.681 dan sebesar Rp. 33.191.335.319 yang berasal dari laba ditahan sampai dengan tahun 1996, yang pembayaran pajaknya akan dibayarkan dari dividen tunai tahun 1997. Ketentuan rasio dividen saham : setiap pemegang 25 saham berhak memperoleh 9 dividen saham, dengan dasar perhitungan harga penutupan saham Perseroan pada tanggal 29 Juni 1998 pukul 12.00 bbwi sebesar Rp. 725.

Setelah pembagian saham bonus dan dividen saham dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 1998 maka struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan secara proforma adalah sebagai berikut:

	Sebelum pembagian saham bonus & dividen saham		Setelah pembagian saham bonus dan dividen saham	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	1.000.000.000	500.000.000.000	1000.000.000	500.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
1. PT Suryasono Sentosa	58.555.000	29.277.500.000	98.957.950	49.478.975.000
2. PT Udayawira Utama	58.555.000	29.277.500.000	98.957.950	49.478.975.000
3. Karmaka Surjaudaja	140.000	70.000.000	236.600	118.300.000
4. Masyarakat	57.750.000	28.875.000.000	97.597.500	48.798.750.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	175.000.000	87.500.000.000	295.750.000	147.875.000.000
Jumlah Saham Dalam Portepel	825.000.000	412.500.000.000	704.250.000	352.125.000.000

3. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

a. PT Suryasono Sentosa

Pendirian

PT Suryasono Sentosa (selanjutnya disebut "SS") didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Suryasono Sentosa No. 182 tanggal 26 Januari 1994, dibuat dihadapan Lien Tanudirdja, S.H, Notaris di Bandung, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-7918.HT.01.01.Th.94 tanggal 19 Mei 1994, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Bandung di bawah No. 875 tanggal 2 Juni 1994, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 23 Agustus 1994, Tambahan No. 5893.

Perubahan seluruh Anggaran Dasar SS terakhir dimuat dalam Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Juni 1998, dibuat oleh Ny. Widyawati Witjaksana, S.H, pengganti dari Lien Tanudirdja, S.H, Notaris di Bandung.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Risalah RULBPS No. 25 tanggal 18 Juni 1998, yang dibuat oleh Ny. Widyawati Witjaksana, S.H, pengganti dari Lien Tanudirdja, S.H, Notaris di Bandung, maksud dan tujuan SS adalah mendirikan dan menjalankan usaha di bidang perindustrian, pertambangan, kehutanan, pengangkutan, pertanian, perkebunan, peternakan serta perikanan darat/laut, real estate dan industrial estate, perdagangan umum, ekspor-impor barang yang diperkenankan Pemerintah,

perdagangan keagenan dan komisi, leveransir/pemasok, grosir, distributor, supplier dan penyalur, bidang jasa kecuali jasa dalam bidang hukum, dan sewa menyewa barang bergerak dan tidak bergerak.

Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 84 tanggal 2 Agustus 1994 dan berdasarkan Akta Hibah Saham No. 24 tanggal 18 Juni 1998, yang mana kedua Akta tersebut dibuat dihadapan Ny. Widyawati Witjaksana, S.H, pengganti dari Lien Tanudirdja, S.H, Notaris di Bandung, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	20.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Karmaka Surjaudaja	4.330.279	4.330.279.000	27,19
2. Ny. Lelarati Lukman	2.516.620	2.516.620.000	15,80
3. Peter Eko Sutioso, S.H	1.070.852	1.070.852.000	6,72
4. dr. Pramana Surjaudaja	8.008.249	8.008.249.000	50,28
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.926.000	15.926.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.074.000	4.074.000.000	

Susunan pemegang saham tersebut di atas tidak berubah sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Risalah RULBPS No. 25 tanggal 18 Juni 1998, yang dibuat oleh Ny. Widyawati Witjaksana, S.H, pengganti dari Lien Tanudirdja, S.H, Notaris di Bandung, susunan Komisaris dan Direksi SS adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Karmaka Surjaudaja
 Komisaris : Peter Eko Sutioso, S.H
 Komisaris : Ny. Lelarati Lukman
 Komisaris : Sanitri Surjaudaja

Direksi

Direktur Utama : dr. Pramana Surjaudaja
 Direktur : drg. Rukita Sudarmono

b. PT Udayawira Utama

Pendirian

PT Udayawira Utama (selanjutnya disebut "UU") didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Udayawira Utama No. 181 tanggal 26 Januari 1994, dibuat dihadapan Lien Tanudirdja, S.H, Notaris di Bandung, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-7919.HT.01.01.Th.94 tanggal 19 Mei 1994, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Bandung di bawah No. 877 tanggal 2 Juni 1994, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 23 Agustus 1994, Tambahan No. 5892.

Perubahan seluruh Anggaran Dasar UU terakhir dimuat dalam Akta Risalah RULBPS No. 28 tanggal 18 Juni 1998, dibuat oleh Ny. Widyawati Witjaksana, S.H, pengganti dari Lien Tanudirdja, S.H, Notaris di Bandung.

Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Akta Risalah RULBPS No. 28 tanggal 18 Juni 1998, dibuat oleh Ny. Widyawati Witjaksana, S.H, pengganti dari Lien Tanudirdja, S.H, Notaris di Bandung, maksud dan tujuan UU adalah mendirikan dan menjalankan usaha di bidang perindustrian, pertambangan, kehutanan, pengangkutan, pertanian, perkebunan, peternakan serta perikanan darat/laut, real estate dan industrial estate, perdagangan umum, ekspor-impor barang yang diperkenankan Pemerintah, perdagangan keagenan dan komisi, leveransir/pemasok, grosir, distributor, supplier dan penyalur, bidang jasa kecuali jasa dalam bidang hukum, dan sewa menyewa barang bergerak dan tidak bergerak.

Permodalan

Berdasarkan Akta Risalah RULBPS No. 28 tanggal 18 Juni 1998, dibuat oleh Ny. Widyawati Witjaksana, S.H, pengganti dari Lien Tanudirdja, S.H, Notaris di Bandung, struktur permodalan UU adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	20.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ny. Lelarati Lukman	12.305.925	12.305.925.000	78,45
2. Pramukti Surjaudaja	3.380.075	3.380.075.000	21,55
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.686.000	15.686.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.314.000	4.314.000.000	

Susunan pemegang saham tersebut di atas tidak berubah sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Risalah RULBPS No. 28 tanggal 18 Juni 1998, dibuat oleh Ny. Widyawati Witjaksana, S.H, pengganti dari Lien Tanudirdja, S.H, Notaris di Bandung, susunan Komisaris dan Direksi UU adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Pramukti Surjaudaja, MBA
 Komisaris : Parwati Surjaudaja, MBA

Direksi

Direktur Utama : Ny. Lelarati Lukman
 Direktur : Sanitri Surjaudaja

4. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN AFILIASI

Perusahaan afiliasi adalah perusahaan dimana Perseroan mempunyai penyertaan. Saat ini Perseroan melakukan penyertaan pada 3 (tiga) perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan dan pembiayaan. Dua dari perusahaan afiliasi tersebut juga menjalin hubungan kerjasama (partnership) dengan bank dari luar negeri.

Berikut ini adalah uraian singkat mengenai perusahaan afiliasi dimana Perseroan melakukan penyertaan, per 31 Desember 1997:

a. PT Daiwa Perdanania Bank ("DPB")

Pendirian

DPB semula didirikan dengan nama N.V. Bank Pembangunan berdasarkan Akta No. 104 tanggal 31 Desember 1953 juncto Akta No. 29 keduanya dibuat dihadapan Raden Meester Soewandi, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. J.A.5/15/11 tanggal 15 Pebruari 1956, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut dibawah No. 354 dan 355 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 17 tanggal 28 Pebruari 1956, Tambahan No. 168.

N.V. Bank Pembangunan berubah namanya menjadi DPB berdasarkan Akta No. 1 tanggal 6 Juli 1993, dibuat dihadapan Hendra Karyadi, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4782.HT.01.04.Th.93 tanggal 19 Agustus 1993, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2323/1993 tanggal 1 September 1993, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 22 Oktober 1993, Tambahan No.4961.

Anggaran Dasar DPB telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diubah dengan Catatan Resmi Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham (RULBPS) PT Daiwa Perdanania Bank yang telah didaftarkan (Waarmerking) pada Saal Bumela, S.H, Notaris di Jakarta dibawah No. 266/W/1998/rangkap 3 tanggal 20 Agustus 1998.

Maksud dan Tujuan

Menjalankan usaha sebagai Bank Umum, terutama memberikan kredit di bidang industri dalam negeri, menjalankan usaha sebagai bank devisa, menjalankan usaha sebagai "trust & agency business" dalam bidang moneter dan keuangan, DPB dapat ikut mendirikan serta mengambil bagian dalam ataupun menjalankan pengurusan perusahaan-perusahaan lain.

Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 44 tanggal 20 September 1994, dibuat dihadapan Hendra Karyadi, S.H, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman RI dengan Keputusan No. C2-16.203.HT.01.04.Th.94 tanggal 27 Oktober 1994, dan diumumkan dalam BNRI No.11 tanggal 7 Pebruari 1995, Tambahan No. 1121, struktur permodalan dan pemegang saham DPB adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham		Jumlah Nilai	Persentase
	Saham Istimewa	Saham Biasa	Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.000	1.999.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
1. The Daiwa Bank Ltd.	850	1.061.001	106.185.100.000	84,95
2. PT Bank NISP Tbk	93	149.056	14.914.900.000	11,93
3. Samadikun Hartono	29	19.471	1.950.000.000	1,56
4. Wiliam Budiman	28	19.472	1.950.000.000	1,56
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.249.000	125.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	750.000	75.000.000.000	

Susunan pemegang saham tersebut di atas tidak berubah sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

Manajemen dan Pengawasan

Susunan Komisaris dan Direksi DPB berdasarkan Catatan Resmi Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Daiwa Perdania Bank yang telah di daftarkan (Waarmerking) oleh Saal Bumela, S.H, Notaris di Jakarta di bawah No. 266/W/1998/ rangkap 3 tanggal 20 Agustus 1998 adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Ilham Indro Wibisono
 Komisaris : Masahiro Oyama
 Komisaris : Karmaka Surjaudaja

Direksi

Presiden Direktur : Kiyoshige Ito
 Direktur : Yoshiyuki Shimadate
 Direktur : Moro Arisnu
 Direktur : Tsune Ueda
 Direktur : Abdul Harris Hartanto

b. PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia ("SBPI")

Pendirian

SBPI didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia No. 1 tanggal 1 Juni 1981, dibuat dihadapan Sutjipto, S.H, Kandidat Notaris, pengganti Julian Nimrod Siregar, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. Y.A.5/553/10 tanggal 27 Oktober 1981, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 3891 tanggal 3 Nopember 1981, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tanggal 26 Maret 1982, Tambahan No. 365.

Anggaran Dasar SBPI telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (dibawah tangan) tertanggal 28 Juni 1996.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan SBPI sebagai lembaga keuangan non bank adalah pengerahan dana dengan maksud agar mengembangkan perusahaan-perusahaan nasional dan peranan permodalan nasional untuk memberikan sumbangan kepada perkembangan ekonomi Indonesia dalam arti kata seluas-luasnya.

Permodalan

Modal Dasar SBPI adalah sebesar Rp. 6.700.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus juta rupiah) terdiri dari 6.700 (enam ribu tujuh ratus) saham, masing-masing bernilai nominal Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

Modal Ditempatkan dan Disetor adalah sebesar Rp. 6.700.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus juta rupiah), dengan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	6.700	6.700.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Bank Bumi Daya	536	536.000.000,00	8
2. Bank Dagang Negara	536	536.000.000,00	8
3. Bank Ekspor Impor Indonesia	536	536.000.000,00	8
4. Bank Negara Indonesia	536	536.000.000,00	8
5. Bank Rakyat Indonesia	536	536.000.000,00	8
6. Bank Pembangunan Indonesia	670	670.000.000,00	10
7. Bank Central Asia	375	375.000.000,00	5,60
8. Bank Umum Nasional	156	156.000.000,00	2,33
9. Bank Bali	313	313.000.000,00	4,67
10. Bank Duta Ekonomi	156	156.000.000,00	2,33
11. Bank Panin Tbk.	625	625.000.000,00	9,33
12. Bank Nisp Tbk	31	31.000.000,00	0,46
13. Lain-lain *)	1694	1.694.000.000,00	74,72
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.700	6.700.000.000,00	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-		

*) Dimiliki oleh beberapa pemegang saham dengan kepemilikan masing-masing dibawah 2%

Susunan pemegang saham tersebut di atas tidak berubah sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

Manajemen dan Pengawasan

Susunan Komisaris dan Direksi SBPI per 31 Desember 1997 adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Trenggono Purwosuprodjo
 Direktur : Subiyanto Suronegoro

Direktur : I Wayan Pugeg
 Direktur : Siswanto
 Direktur : Noer Darodjatoen
 Direktur : I Nyoman Moena
 Direktur : Wibowo Ngasirin
 Direktur : A. Soebowo
 Direktur : I.G.N Antika
 Direktur : Priyadi P.S

*Catatan:

Didalam akta tidak dicantumkan mengenai susunan anggota Komisaris.

c. PT Bank OCBC-NISP ("OCBC-NISP")

Pendirian

OCBC-NISP didirikan berdasarkan Akta No. 2 tanggal 4 Juli 1996, dibuat dihadapan Agus Hashim Ahmad, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-8263.HT.01.01.Th.96 tanggal 2 Agustus 1996, telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 554/BH.09.05/111/1997 tanggal 25 Maret 1997, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 35 tanggal 2 Mei 1997, Tambahan No. 1740.

Anggaran Dasar OCBC-NISP telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan (Resolusi) Pemegang Saham No. 2 tanggal 4 September 1997, dibuat dihadapan Agus Hashim Ahmad, S.H, Notaris di Jakarta.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan OCBC-NISP adalah menjalankan usaha-usaha suatu bank campuran pada umumnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, OCBC-NISP dapat melakukan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Permodalan

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	250.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Overseas Chinese Banking Corp. Ltd.	127.500	127.500.000.000	85,00
2. PT Bank NISP Tbk.	22.500	22.500.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	150.000	150.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	100.000	100.000.000.000	

Susunan pemegang saham tersebut di atas tidak berubah sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

Manajemen dan Pengawasan

Susunan Komisaris dan Direksi OCBC-NISP berdasarkan Akta No. 2 tanggal 4 September 1997, dibuat dihadapan Agus Hashim Ahmad, S.H, Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris	:	Michael Wong Pakshong
Wakil Presiden Komisaris	:	Karmaka Surjaudaja
Komisaris	:	Ng Tat Pun
Komisaris	:	Jairam Amrith
Komisaris	:	Pramukti Surjaudaja
Komisaris	:	Wong Nang Jang
Komisaris	:	Wong Yew Kuen
Komisaris	:	Lee Tih Shih

Direksi

Presiden Direktur	:	Goh Kim Bun
Wakil Presiden Direktur	:	Chia Kien Sian
Wakil Presiden Direktur	:	Drs. Willy Prajogo
Direktur	:	Tay Choon Wang, Ronald

5. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi mengelola Perseroan dibawah pengawasan Komisaris. Anggota Komisaris dan Direksi dipilih dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank NISP Tbk. No. 95 tanggal 29 Juni 1998 yang dibuat dihadapan Ny. Indah Fatmawati, S.H, pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, susunan anggota Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris	:	Karmaka Surjaudaja
Wakil Presiden Komisaris	:	Peter Eko Sutioso, S.H
Komisaris	:	Lelarati Lukman
Komisaris	:	dr. Pramana Surjaudaja, MBA
Komisaris	:	Anwary Surjaudaja
Komisaris	:	Dra. Mariawati Halim

Direksi

Presiden Direktur	:	Pramukti Surjaudaja, MBA
Wakil Presiden Direktur	:	Parwati Surjaudaja, MBA
Direktur	:	Kamsidin Wiradikusumah
Direktur	:	Dra. Ratna Dewiyanti
Direktur	:	Hardi Juganda, S.H

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan:

KOMISARIS



Karmaka Surjaudaja, *Presiden Komisaris*

Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Presiden Komisaris Bank NISP sejak April 1997, sebelumnya Presiden Direktur Bank NISP (1963-April 1997). Wakil Presiden Komisaris Bank OCBC-NISP sejak tahun 1997, Komisaris Daiwa Perdania Bank sejak tahun 1992. Aktif di berbagai kegiatan kemasyarakatan dan sosial. Sebelum di Bank NISP, sejak tahun 1958 Manager N.V. Padasuka dan Direktur Dharmakusuma, Textile & Trading Co.



Peter Eko Sutioso, S.H, *Wakil Presiden Komisaris*

Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum dari Universitas Pajajaran, Bandung pada tahun 1965. Wakil Presiden Komisaris sejak Juni 1998. Komisaris Bank NISP (April 1997-Juni 1998), sebelumnya Direktur Bank NISP (1972-April 1997). Wakil Ketua Dewan Pertimbangan PERBANAS Jawa Barat sejak tahun 1988. Wakil Ketua II BMPD Jawa Barat (1980-1988) Aktif di berbagai jasa kemasyarakatan dan pendidikan.



Lelarati Lukman, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Komisaris Bank NISP sejak tahun 1982. Direktur Utama PT Udayawira Utama sejak tahun 1994. Ketua Yayasan Bio-Test Medical Laboratories di Bandung dan Surabaya. Aktif berwiraswasta sejak tahun 1968 di bidang jasa perawatan dan sejak tahun 1980 di bidang jasa kesehatan.



dr Pramana Surjaudaja, MBA, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 39 tahun. Menyelesaikan pendidikan dari jurusan Kedokteran di Universitas Pajajaran, Bandung pada tahun 1985 dan melanjutkan pendidikan di Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen, Jakarta dengan memperoleh gelar MBA pada tahun 1991. Komisaris Bank NISP sejak tahun 1983. Direktur Utama PT Suryasono Sentosa sejak tahun 1994. Pegawai Negeri (1985-1988), mendapat penghargaan sebagai tokoh masyarakat di bidang pembangunan bidang kesehatan, dokter teladan dan Pegawai Negeri teladan. Aktif di bidang olah raga, Ketua Pengda Perbasasi Jawa Barat, Pimpro Sea Games XIX-Jakarta.



Anwary Surjaudaja, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Menyelesaikan pendidikan jurusan Ekonomi dari Akademi Manajemen Indonesia pada tahun 1989 dan mengikuti pendidikan SESPIBI (Sekolah Staff Pimpinan Bank Indonesia) Angkatan XI tahun 1994. Komisaris Bank NISP sejak tahun 1991, sebelumnya Direktur Bank NISP (1985-1991), dan menduduki berbagai posisi di Bank NISP sejak 1971-1986. Direktur Utama Hastin International Bank dan Komisaris Bank Century Interinvest Corporation. Wakil Ketua Umum bidang Antar Daerah PERBANAS Pusat dan Sekretaris Dewan Pembina Banker's Club. Aktif di berbagai kegiatan sosial dan bidang olah raga.



Dra. Mariawati Halim, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di bidang Ekonomi Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1967. Komisaris Bank NISP sejak Juli 1997. Vice President Bank of America (Juli 1985). Presiden Direktur PT First Indo-American Leasing Co. (1991-1995). Sejak 1968 menempati berbagai posisi dan bidang di Bank of America, Jakarta. Berbagai pelatihan antara lain di bidang treasury, kredit dan trade finance di dalam dan luar negeri.

DIREKSI



Pramukti Surjajudaja, MBA, Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 36 tahun. Mendapatkan gelar Bsc Banking dari San Fransisco State University, California, USA tahun 1978 dan MBA dari Golden Gate University, San Fransisco, USA tahun 1985. Beberapa pendidikan perbankan yang pernah diikuti antara lain: Sekolah Staff Pimpinan Bank Indonesia (Angkatan XVI), Executive Program di Massachusetts Institute of Technology dan Standford University di USA. Pernah mengikuti beberapa program pelatihan yang diselenggarakan oleh Daiwa Bank, Daiwa Overseas Finance, Daiwa Capital Management dan Daiwa Trust. Presiden Direktur Bank NISP sejak April 1997, sebelumnya Direktur Bank NISP (1989-April 1997), Komisaris Bank OCBC-NISP sejak tahun 1997. Pengurus PERBANAS Pusat (1994-1999).



Parwati Surjajudaja, MBA, Wakil Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 34 tahun. Pendidikan hingga Master of Business Administration - Accounting di San Fransisco State University, USA (1987, Cum Laude). Beberapa pendidikan perbankan lainnya yang pernah diikuti antara lain: Asia Pacific Basic Banking School dari Andersen Consulting di Singapore, Sekolah Staff Pimpinan Bank Indonesia (Angkatan XVII), Loan Auditing & Fraud Auditing dari Institute Of Banking & Finance di Singapore, dan Merger Acquisition Course dari Euromoney di Singapore. Wakil Presiden Direktur Bank NISP sejak Juni 1998, sebelumnya Direktur Bank NISP (1990-Juni 1998). Konsultan senior di SGV Utomo/Arthur Andersen (1987-1990).



Kamsidin Wiradikusumah, *Direktur*

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Mengikuti pendidikan jurusan Ekonomi dari Universitas Parahyangan, Bandung pada tahun 1969. Mengikuti beberapa kursus dan seminar di bidang administrasi, akuntansi, perbankan dan hukum. Direktur Bank NISP sejak April 1997, bergabung di Bank NISP tahun 1988 dengan jabatan terakhir Pemimpin Kantor Cabang Utama Jakarta (1994-97). Wakil Ketua BMPD Bogor (1990-1994).



Dra. Ratna Dewiyanti, *Direktur*

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Menyelesaikan pendidikan jurusan Manajemen (1978) dan Akuntansi (1979) dari Universitas Parahyangan Bandung. Mengikuti pendidikan Sekolah Staff Pimpinan Bank di Lembaga Perbankan Indonesia serta beberapa kursus dan seminar di bidang perbankan, komputer, hukum dan pemasaran. Direktur Bank NISP sejak April 1997, bergabung di Bank NISP tahun 1981 dengan jabatan terakhir Pemimpin KPO Bandung (1991-97). Wakil Ketua PERBANAS Jawa Barat (1997-2000)



Hardi Juganda, S.H, *Direktur*

Warga Negara Indonesia, 40 tahun. Menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum dari Universitas Parahyangan Bandung pada tahun 1985. Mengikuti pendidikan Sekolah Staff Pimpinan Bank di Lembaga Perbankan Indonesia (Jakarta), kursus Pejabat Pemberi Kredit - LPPI (Bandung), serta berbagai kursus dan seminar di bidang kredit, pemasaran, komputer dan jasa pelayanan. Direktur Bank NISP sejak April 1997, bergabung di Bank NISP tahun 1985 dengan jabatan terakhir Pemimpin Kantor Cabang Asia Afrika Bandung (1991-1997)

6. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan asset utama dari Perseroan dan memiliki peran yang sangat penting didalam menentukan keberhasilan berlangsungnya kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi perusahaan, maka mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas dari sumber daya manusianya sehingga dapat dicapai pendayagunaan SDM secara optimal.

Penyempurnaan organisasi guna menciptakan sistem manajemen yang lebih baik terus dilakukan. Penataan manajemen sumber daya manusia meliputi penataan jenjang karier, kepangkatan, kompensasi serta kesejahteraan. Berbagai pelatihan terus dilaksanakan dengan dipandu oleh tenaga instruktur intern maupun mengundang instruktur dari luar, seperti World Trade Centre dan lembaga pelatihan profesional lainnya. Kesejahteraan karyawanpun mendapatkan perhatian dalam rangka meningkatkan motivasi serta produktivitas kerja. Fasilitas yang diberikan untuk kesejahteraan karyawannya meliputi :

- Fasilitas pengobatan dan perawatan rumah sakit sampai dengan batas tertentu
- Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek)
- Fasilitas pinjaman untuk para karyawan
- Tunjangan Hari Raya (THR)

Fasilitas - fasilitas kesejahteraan karyawan diberikan kepada setiap karyawan dengan jumlah dan batas yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu (jabatan/masa kerja/posisi dan lain-lain).

Disamping itu untuk mendukung kesejahteraan karyawannya, Perseroan juga mendirikan koperasi karyawan "KARYA MANDIRI" yang berdiri sejak tanggal 23 Februari 1991. Hingga saat ini koperasi tersebut telah beranggotakan 222 karyawan.

Pelatihan yang diselenggarakan, meliputi :

1. Pelatihan Intern

Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas serta mendukung perubahan sistem yang berlaku di Perseroan, maka berbagai pelatihan intern yang diselenggarakan Perseroan difokuskan pada :

- Persiapan sistem reorganisasi yang berjalan di Perseroan
- Ketrampilan teknis perbankan
- Ketrampilan menjual
- Ketrampilan manajemen
- Pengembangan pribadi
- Peningkatan mutu

2. Pelatihan Ekstern

Berbagai pelatihan juga dilaksanakan diluar lingkungan Perseroan, dengan mengikutsertakan karyawannya untuk mengikuti seminar dan workshop, diantaranya pelatihan yang menyangkut spesialisasi bidang-bidang seperti perkreditan, jaminan hutang, UU hak tanggungan, serta Treasury.

Pengiriman peserta ke pelatihan -pelatihan (ekstern & intern) didasarkan pada kebutuhan akan pengetahuan dan ketrampilan yang diajarkan baik dengan tujuan untuk mengoptimalkan peserta di pekerjaan mereka saat ini maupun untuk pengembangan karir mereka di masa mendatang.

Per 31 Agustus 1998, Perseroan memiliki karyawan sejumlah 1.108 orang, (dimana terdapat satu orang warga negara asing yang telah memperoleh izin dari Instansi yang berwenang), dengan perincian sebagai berikut :

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	31 Agustus 1998
Manajemen Puncak	4	4	6	6	6	6	5	5
Manajemen Madya	34	36	35	38	38	65	49	52
Manajemen Pelaksana	121	125	135	130	136	101	79	72
Staff	705	725	726	771	718	762	960	981
Total	864	890	902	945	898	934	1.093	1.108

Catatan : Manajemen Puncak : Direksi
 Manajemen Madya : Kepala Satuan Kerja, Pemimpin dan Wakil Cabang
 Manajemen Pelaksana : Pemimpin/Wakil Capem dan Kantor Kas, Supervisor, Kepala Seksi dan Kepala Bagian

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

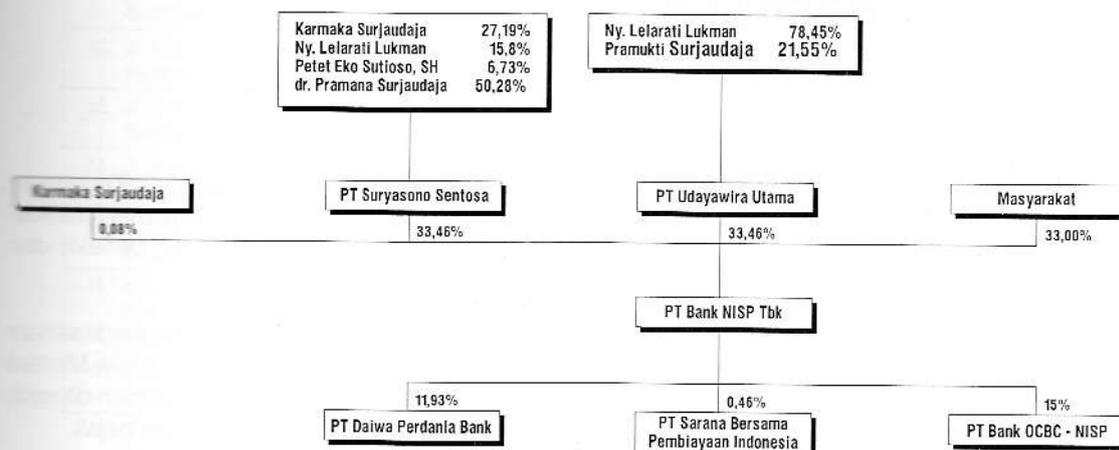
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	31 Agustus 1998
Sarjana	128	131	137	168	171	197	281	277
Sarjana Muda dan Diploma	99	147	143	151	179	183	210	186
Lainnya	637	612	622	626	548	554	602	979
Total	864	890	902	945	898	934	1.093	1.108

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Tahun	1994
> 40 thn	214
36-40 thn	104
31-35 thn	190
26-30 thn	258
20-25 thn	174
< 20 thn	5
Jumlah	945

Tahun	1995	1996	1997	31 Agustus 1998
> 50 thn	62	58	60	43
41-50 thn	119	125	169	168
31-40 thn	320	323	369	376
26-30 thn	252	259	251	255
20-25 thn	139	163	227	247
< 20 thn	6	6	17	19
Jumlah	898	934	1.093	1.108

7. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN



8. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Nama	Perseroan	SS	UU
Pramukti Surjaudaja	Presdir	-	Komut
Parwati Surjaudaja	Wk. Presdir	-	Komisaris
Kamsidin Wiradikusumah	Direktur	-	-
Ratna Dewiyanti	Direktur	-	-
Hardi Juganda	Direktur	-	-
Karmaka Surjaudaja	Preskom	Komut	-
Peter Eko Sutioso	Wk. Preskom	Komisaris	-
Lelarati Lukman	Komisaris	Komisaris	Dirut
Pramana Surjaudaja	Komisaris	Dirut	-
Anwary Surjaudaja	Komisaris	-	-
Mariawati Halim	Komisaris	-	-
Rukita Sudarmono	-	Direktur	-
Sanitri Surjaudaja	-	Komisaris	Direktur

Keterangan:

Presdir	: Presiden Direktur	Dirut	: Direktur Utama
Wk. Presdir	: Wakil Presiden Direktur	SS	: PT Suryasono Sentosa
Wk. Preskom	: Wakil Presiden Komisaris	UU	: PT Udayawira Utama
Komut	: Komisaris Utama		

9. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam menjalankan kegiatannya, Perseroan melakukan transaksi usaha dengan Pihak Afiliasi, yaitu pihak yang mempunyai hubungan secara langsung atau tidak langsung, mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dan mempunyai hubungan sebagai pemegang saham utama dari Perseroan. Transaksi-transaksi dengan pihak afiliasi meliputi:

- Pemberian Kredit
- Penghimpunan dana, dalam bentuk giro, deposito, tabungan ataupun pinjaman

Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu penyaluran kredit atas nama Ibu Lelarati Lukman yang merupakan salah seorang Komisaris Perseroan, nilai pinjamannya terakhir sebesar Rp 17,3 milyar.

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan memulai kegiatan operasi perbankannya sebagai Bank Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no. D. 15.6.2.27 tanggal 20 Juli 1967. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Bank Indonesia.

Pada tanggal 19 Mei 1990, Bank NISP ditingkatkan statusnya menjadi Bank Devisa berdasarkan Keputusan Direksi Bank Indonesia no. 23/9/KEP/DIR. Selanjutnya, dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S-35/MK.03/1993 tanggal 6 Januari 1993, Perseroan ditunjuk menjadi salah satu Bank Persepsi yang diijinkan menerima setoran pajak dan bukan pajak.

Berdasarkan surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-1601/PM/1994, pada tanggal 20 Oktober 1994, Perseroan mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek Jakarta, yang menandai statusnya menjadi Bank Publik. Jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Pertama (Initial Public Offering) sebanyak 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per saham dengan harga penawaran Rp. 3.100,- (tiga ribu seratus rupiah) per saham.

Kantor Pusat Perseroan bertempat di Jalan Asia Afrika no. 100 Bandung. Jaringan kantor Perseroan saat ini berjumlah 15 kantor cabang yang terdiri dari masing-masing 1 kantor cabang di Jakarta, Bogor, Semarang, Tangerang, Bekasi, Sukabumi, Surakarta, Batam, Cimahi, Cirebon, 2 kantor cabang di Surabaya dan 3 kantor cabang di Bandung serta 26 kantor cabang pembantu dan 16 kantor kas.

Berdasarkan laporan dari Perusahaan Penilai "PT Inti Utama Penilai" per tanggal 4 Nopember 1998, aktiva tetap yang dimiliki Perseroan dalam bentuk tanah adalah seluas 18.707 m², bangunan seluas 22.745,92 m². Sehingga secara keseluruhan nilai dari total aktiva tersebut sebesar Rp. 64.905.136.000.

DAFTAR JARINGAN KANTOR BANK NISP

No.	Alamat	Status Kantor	Status Kepemilikan
1.	Jl. Asia Afrika No. 100 Bandung 40261	Kantor Pusat & Kantor Cabang	Milik sendiri
2.	Jl. Taman Cibeunying Selatan No. 31 Bandung 40114	Kantor Pusat Operasional	Milik sendiri
3.	Jl. Gunung Sahari No. 38 Jakarta 10720	Kantor Cabang Utama	Milik Sendiri
4.	Jl. Gatot Subroto No. 8 Cimahi 40532	Kantor Cabang	Milik sendiri
5.	Jl. Rajawali Timur No. 27B Kompleks Rajawali Plaza No. 18G-H-IB Bandung 40182	Kantor Cabang	Milik sendiri
6.	Jl. Ir. H. Juanda No. 12 Bogor 16121	Kantor Cabang	Milik sendiri
7.	Jl. R.E. Martadinata No. 32 Sukabumi 43111	Kantor Cabang	Milik Sendiri
8.	Jl. Ahmad Yani, Sentral Niaga Kalimalang Blok A-6 No. 10 Bekasi 17140	Kantor Cabang	Milik sendiri
9.	Jl. Gatot Subroto (d/h Jl. Merdeka) No. 92 A-B Tangerang 15113	Kantor Cabang	Milik Sendiri

10. Jl. Brig. Jend Katamso No.5 - 5A Semarang 50242	Kantor Cabang	Milik sendiri
11. Jl. Pemuda No. 104 - 106 Surabaya 60271	Kantor Cabang	Milik sendiri
12. Jl. Ngagel Jaya Selatan No. 123 Surabaya 60284	Kantor Cabang	Lain-lain*
13. Jl. Slamet Riyadi No. 141 - 143 Surakarta (Solo)	Kantor Cabang	Sewa
14. Jl. Teuku Umar , Kompleks Regency Park Blok I No. 4 - 5 Batam 29432	Kantor Cabang	Milik sendiri
15. Jl. Siliwangi 117 Cirebon 45124	Kantor Cabang	Sewa
16. Kompleks Kopo Permai Estate Blok 6 AR No. 21 Bandung 40227	Kantor Capem	Milik Sendiri
17. Jl. Buah Batu No. 236 Bandung 40265	Kantor Capem	Sewa
18. Jl. Ujung Berung No. 144 Bandung	Kantor Capem	Lain-lain**
19. Jl. Setiabudi No. 170E (Km 6,7) Bandung 40141	Kantor Capem	Milik sendiri
20. Jl. Terusan Jakarta No. 53 Ruko M Borma Antapani Bandung	Kantor Capem	Sewa
21. Jl. Sumber Sari Indah Kav. T-5 Kompleks Pertokoan Sumber Sari Bandung 40222	Kantor Capem	Milik sendiri
22. Jl. Kebonjati No. 152 RS. Kebonjati Bandung	Kantor Capem	Kerja sama
23. Jl. Raya Purwakarta No. 95 Padalarang 40553	Kantor Capem	Lain-lain***
24. Jl. Kiara Payung No. 1 Kompleks Perumahan Taman Rejeki Cibinong 16917	Kantor Capem	Milik sendiri
25. Jl. Raya Siliwangi No. 230 Cicurug 43159	Kantor Capem	Sewa
26. Jl. Siliwangi No. 122 Bogor 16133	Kantor Capem	Milik sendiri
27. Pertokoan Bogor Indah Raya Blok B 4 Jl. Baru Kedung Badak Km 6,6 Bogor	Kantor Capem	Milik sendiri
28. Jl. Surya Kencana No. 117 Cibadak Sukabumi	Kantor Capem	Sewa
29. Jl. Raya Jatinegara Timur 46 B Jakarta 13310	Kantor Capem	Milik sendiri
30. Jl. Kelapa Gading Boulevard Blok LB 1 No. 4 - 5 Jakarta 14240	Kantor Capem	Milik sendiri
31. Kompleks Dusit Mangga Dua Ruko No. 1, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat 10730	Kantor Capem	Milik sendiri (Hak milik atas satuan rumah susun)
32. Jl. K.H. Hasyim Ashari, Kompleks ITC Roxy Mas Blok D III No. 17 Jakarta 10150	Kantor Capem	Milik sendiri
33. Gedung Mitra Hadiprana Lt. 1 Jl. Kemang Raya No. 30 Jakarta Selatan	Kantor Capem	Sewa
34. Jl. Kapten P. Tendean no. 82 Gedung Twink Center Lantai Dasar Jakarta Selatan 12790	Kantor Capem	Sewa
35. Gedung Senatama Lt. Dasar Jl. Kwitang Raya no. 8 Jakarta Pusat	Kantor Capem	Sewa

36.	Ruko Pinangsia Blok I No. 36 LIPPO Karawaci Tangerang	Kantor Capem	Lain-lain****
37.	Jl. Jend. Gatot Subroto No.76 Ungaran 50517	Kantor Capem	Milik sendiri
38.	Jl. Let. Jend. Suprpto No. 3 Semarang 50137	Kantor Capem	Milik sendiri
39.	Jl. Jend. Sudirman 189 Kompleks Siliwangi Plaza Blok C1 Semarang 50142	Kantor Capem	Sewa
40.	Jl. Industri X No. 158 Kompleks Lingkungan Industri Kecil Bugangan Baru Semarang	Kantor Capem	Sewa
41.	Jl. Dalem kaum No. 40 (Jl. Kepatihan No. 11 - 17) KINGiS Shopping Center Lt. 1 Blok NK - FF Bandung 40251	Kantor Capem	Sewa
42.	Kompleks Sekolah St.Aloysius Jl.Sultan Agung No. 4 Bandung.	Kantor Kas	Kerja sama
43.	Jl. Moh. Toha No. 182 Bandung 40243	Kantor Kas	Sewa
44.	Jl. Otista, Kompleks Pasar baru Basement Los A 19 - 20 Bandung 40111	Kantor Kas	Sewa
45.	Jl. Kopo Sayati 100 A, Merlin Dep. Store Bandung	Kantor Kas	Milik sendiri
46.	Jl. Ir. H. Juanda No. 100 RS. Santo Boromeus Bandung 40132	Kantor Kas	Kerja sama
47.	Jl. Cihampelas No. 161 RS. Advent Bandung 40131	Kantor Kas	Kerja sama
48.	Jl. Ciombeuleuit No. 94 Univ. Parahyangan Bandung 40141	Kantor Kas	Kerja sama
49.	Jl. Kakap No. G2-G3 Bandung 40182	Kantor Kas	Milik sendiri
50.	Jl. Bojong Raya No. 99, Cijerah Bandung 40212	Kantor Kas	Sewa
51.	Jl. Dr. Djundjuran No. 78 Bandung 40162	Kantor Kas	Sewa
52.	Jl. Rangga Gading No. 1 Sekolah Kesatuan Bogor 16123	Kantor Kas	Sewa
53.	Pertokoan Griya Kenari Mas Blok A1 No. 18, Cileungsi Bogor	Kantor Kas	Sewa
54.	Jl. Raya Parung No. 566 Show Room Express Motor Kemang Bogor 16330	Kantor Kas	Sewa
55.	Jl. Pramuka Raya Blok A, Lt. 1 Los AKS No. 021-026 Kompleks Pasar Pramuka Jakarta 13140	Kantor Kas	Milik sendiri
56.	Jl.Kartini no. 76-78 Surabaya	Kantor Kas	Sewa
57.	Jl. Pasar Turi Baru Tahap IV Stand R-5 dan R-6 Surabaya 60175	Kantor Kas	Sewa (dengan hak pakai)

* Bangunan milik Perseroan, tanah milik Kota Madya Tingkat II Surabaya.

** Akta Jual Beli dilakukan dan diatas namakan pribadi salah seorang direksi untuk mempertahankan status hak miliknya, namun akan diurus HGB-nya menjadi atas nama NISP berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 8 April 1998.

*** Masih dalam Pelepasan Hak Atas Tanah.

**** Sertifikat HGB masih dalam proses balik nama.

Untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul, harta kekayaan Perseroan telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai.

2. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha Perseroan meliputi penyaluran dana, penghimpunan dana dan pelayanan jasa-jasa lainnya.

2.1. Penghimpunan dana

Dalam menghimpun dana dari masyarakat, Perseroan menekankan pada segi jasa pelayanan yang memberikan kepuasan kepada nasabah dengan menawarkan suku bunga yang wajar dan kompetitif. Dana masyarakat yang dihimpun melalui produk giro, tabungan dan deposito dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Bahkan ditengah situasi krisis ekonomi yang melanda perekonomian Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, Bank NISP tetap mampu meningkatkan penghimpunan dananya dari masyarakat, dimana hal ini menunjukkan masih sangat terjaganya kepercayaan masyarakat kepada Perseroan.

- **Giro**

Simpanan dana dalam bentuk Rupiah, US Dollar ataupun Singapore Dollar (khusus di Kantor Cabang Batam) yang dapat ditarik setiap saat juga menunjukkan pertumbuhan, meskipun tidak sebesar produk jenis lainnya.

- **Tabungan**

Produk ini terdiri dari Tabanas, Rekening Tabungan, Tabungan Harian, Tabungan Berjangka dan Tabungan hadiah H plus H. Produk-produk ini berkembang dengan pesat dalam 3 tahun terakhir.

- **Deposito**

Dana pihak ketiga yang dihimpun melalui produk deposito berjangka dan sertifikat deposito, jumlahnya paling besar diantara keseluruhan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh Perseroan.

Berikut ini adalah tabel Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun Perseroan per tanggal 31 Desember 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 dan 31 Agustus 1998 :

DANA PIHAK KETIGA

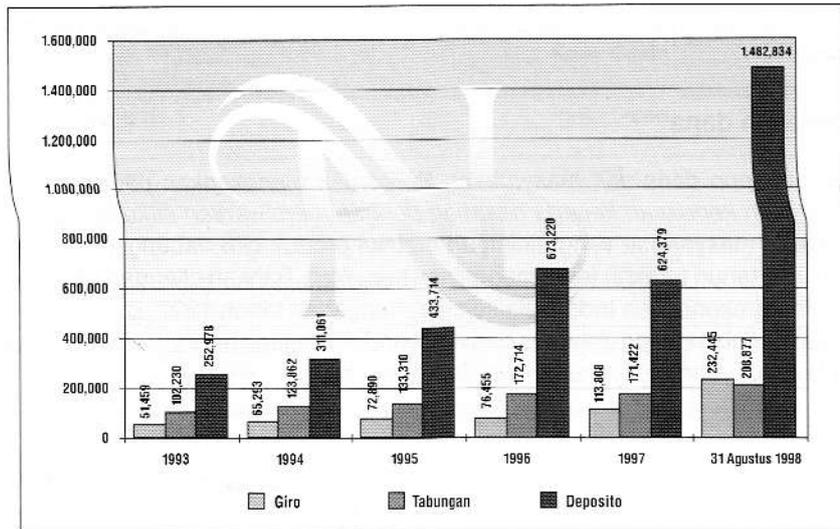
(dalam jutaan Rupiah)

Dana Pihak Ketiga	1993		1994		1995		1996		1997		31 Agustus 1998	
	Jumlah	%	Jumlah	%								
Giro	51.459	13	65.293	13	72.890	11	76.455	8	113.808	12	232.445	12
Tabungan	102.230	25	123.862	25	133.310	21	172.714	19	171.422	19	208.877	11
Deposito	252.978	62	311.061	62	433.714	68	673.220	73	624.379	69	1.482.834	77
Jumlah	406.667	100	500.216	100	639.914	100	922.389	100	909.609	100	1.924.156	100

KOMPOSISI DEPOSITO BERJANGKA BERDASARKAN JANGKA WAKTU

(dalam jutaan Rupiah)

Deposito berjangka	1993	1994	1995	1996	1997	31 Agustus 1998
1 bulan	34.739	67.367	110.607	280.856	323.589	900.325
3 bulan	48.603	65.600	87.210	108.782	146.444	491.987
6 bulan	54.154	73.041	99.359	119.968	67.938	28.941
12 bulan	99.685	91.710	124.661	110.113	73.244	45.386
24 bulan	15.797	13.342	11.877	53.501	13.165	16.197
Jumlah	252.978	311.061	433.714	673.220	624.379	1.482.835



- Perseroan menerima sumber dana lainnya diluar dana pihak ketiga berupa pinjaman yang diterima. Pinjaman tersebut diantaranya berasal dari Bank Exim Jepang dan FMO (Nederlandse Financiaering Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V. atau Bank Pembangunan Belanda) yang disalurkan melalui Bank Indonesia dalam rangka penerusan pinjaman (two step loan) dan khusus untuk membiayai Kredit Usaha Kecil. Perseroan juga melakukan diversifikasi penghimpunan dana dengan menerbitkan Obligasi dan Medium Term Notes.

2.2. Penyaluran Dana

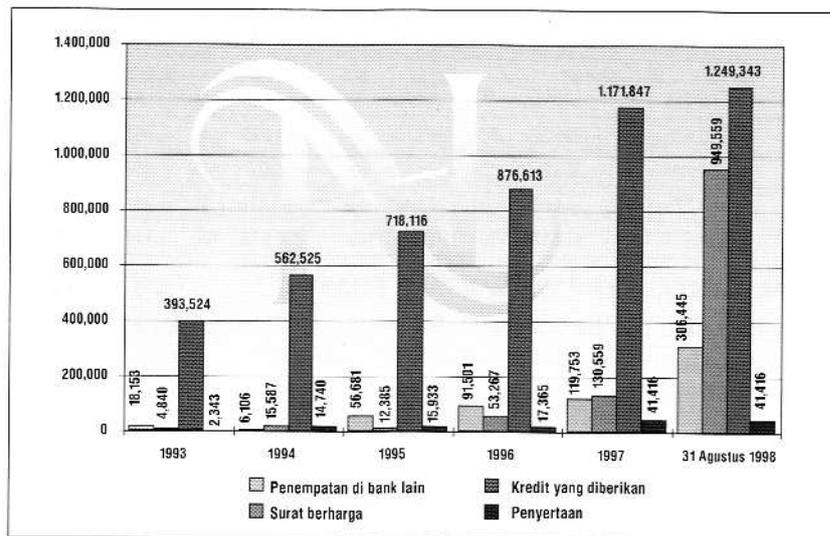
Penempatan dan penyaluran dana ke dalam aktiva yang produktif yaitu meliputi pemberian kredit, penempatan di bank lain, surat berharga dan penyertaan.

Berikut adalah tabel penyaluran dana dalam aktiva produktif pada tanggal-tanggal 31 Desember 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 dan 31 Agustus 1998.

TABEL PENYALURAN DANA

(dalam jutaan Rupiah)

Penyaluran Dana	1993		1994		1995		1996		1997		31 Agustus 1998	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Penempatan di bank lain	18.153	4	6.106	1	56.681	7	91.501	9	119.753	8	306.445	12
Surat berharga	4.840	1	15.587	3	12.385	2	53.267	5	130.559	9	949.559	37
Kredit yang diberikan	393.524	94	562.525	94	718.116	89	876.613	84	1.171.847	80	1.249.343	49
Penyertaan	2.327	1	14.740	2	15.933	2	17.365	2	41.416	3	41.416	2
Jumlah	418.844	100	598.958	100	803.115	100	1.038.746	100	1.463.576	100	2.546.764	100



Didalam menyalurkan dananya, Perseroan senantiasa menerapkan kebijakan/prinsip kehati-hatian, yang diwujudkan dengan cara melakukan diversifikasi dalam pemberian kreditnya sehingga konsentrasi pada sektor industri atau kelompok nasabah tertentu dapat dihindari. Portofolio kredit Perseroan saat ini terutama disalurkan ke sektor perindustrian, perdagangan dan jasa.

Berikut ini adalah tabel portofolio kredit berdasarkan sektor usaha per tanggal 31 Desember 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 dan 31 Agustus 1998

TABEL PORTOFOLIO KREDIT BERDASARKAN SEKTOR USAHA

(dalam jutaan Rupiah)

Sektor Usaha	1993		1994		1995		1996		1997		31 Agustus 1998	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Perindustrian	104.248	27	130.389	23	156.056	22	177.567	21	265.704	23	318.171	25
Konstruksi	20.978	5	34.991	6	54.383	7	70.002	8	72.057	6	67.558	5
Perdagangan	112.944	29	133.746	24	175.411	24	237.244	27	362.945	31	394.841	32
Jasa	118.730	30	166.749	30	212.675	30	275.400	31	354.912	30	393.686	32
Lain-lain	36.623	9	96.650	17	119.591	17	116.400	13	116.228	10	75.087	6
Jumlah	393.523	100	562.525	100	718.116	100	876.613	100	1.171.846	100	1.249.343	100

Ditinjau dari segi skala/nilai kredit, Perseroan mengelompokkan portofolio kreditnya dalam 3 kategori, yaitu : kredit skala kecil (kredit dengan nilai dibawah Rp. 500 juta), kredit skala menengah (kredit dengan nilai mulai dari Rp. 500 juta hingga Rp. 5 miliar) dan kredit skala besar (kredit dengan nilai Rp. 5 miliar ke atas). Sebagian besar dari portofolio kredit Perseroan berada dalam kategori skala kecil dan menengah dimana hal ini sejalan dengan strategi Perseroan yang memfokuskan pangsa pasarnya pada sektor ritel. Sejak terjadinya krisis, komposisi kredit ditahun 1997 dan 1998 seakan-akan mengalami pergeseran, dimana prosentase kredit skala menengah dan besar tampak mendominasi. Hal ini disebabkan oleh terjadinya lonjakan nilai kurs valuta asing, sehingga kredit yang dinyatakan dalam valuta asing nilainya meningkat secara menyolok.

Berikut ini adalah tabel portofolio kredit berdasarkan skala kredit per tanggal 31 Desember 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 dan 31 Agustus 1998.

TABEL PORTOFOLIO KREDIT BERDASARKAN SKALA KREDIT

(dalam jutaan Rupiah)

Skala Kredit	1993		1994		1995		1996		1997		31 Agustus 1998	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Kecil	240.522	61	295.320	52	365.156	51	424.995	49	457.006	39	329.021	26
Menengah	147.726	38	253.203	45	279.524	39	354.507	40	456.240	39	372.492	30
Besar	5.275	1	14.002	3	73.436	10	97.111	11	258.600	22	547.830	44
Jumlah	393.523	100	562.525	100	718.116	100	876.613	100	1.171.846	100	1.249.343	100

Dilihat dari jangka waktu pemberian kredit, Perseroan lebih memfokuskan penyaluran dananya kedalam kredit jangka pendek dan jangka menengah. Berikut adalah tabel penyaluran kredit berdasarkan jangka waktu per tanggal 31 Desember 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 dan 31 Agustus 1998.

TABEL PORTOFOLIO KREDIT BERDASARKAN JANGKA WAKTU

(dalam jutaan Rupiah)

Jangka Waktu Kredit	1993		1994		1995		1996		1997		31 Agustus 1998	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
s/d 2 tahun	354.825	90	462.179	82	598.736	83	739.322	84	931.585	79	995.460	80
> 2 tahun	38.698	10	100.346	18	119.380	17	137.291	16	240.261	21	253.883	20
Jumlah	393.523	100	562.525	100	718.116	100	876.613	100	1.171.846	100	1.249.343	100

Dilihat dari tujuan penggunaannya, Perseroan mengelompokkan portofolio kreditnya dalam 3 kategori, yaitu : kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumsi. Sebagian besar dari portofolio kredit Perseroan diberikan dalam bentuk kredit modal kerja.

Berikut adalah tabel penyaluran kredit berdasarkan jenis penggunaan kredit pada tanggal-tanggal 31 Desember 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 dan 31 Agustus 1998:

TABEL PORTOFOLIO KREDIT BERDASARKAN JENIS PENGGUNAAN KREDIT

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis Penggunaan Kredit	1993		1994		1995		1996		1997		31 Agustus 1998	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Modal Kerja	332.700	84	439.885	78	571.759	80	679.440	78	936.786	80	956.134	77
Investasi	41.900	11	37.472	7	38.206	5	86.284	10	135.777	12	223.047	18
Konsumsi	18.923	5	85.168	15	108.151	15	110.889	12	99.283	8	70.162	6
Jumlah	393.523	100	562.525	100	718.116	100	876.613	100	1.171.846	100	1.249.343	100

Pada tabel berikut disajikan Tabel Portofolio Kredit kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga serta disajikan pula Tabel Portofolio Kredit berdasarkan 5 kategori kolektibilitas.

TABEL PORTOFOLIO KREDIT PIHAK HUBUNGAN ISTIMEWA & PIHAK KETIGA*(dalam jutaan Rupiah)*

	1993		1994		1995		1996		1997		31 Agustus 1998	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pinak hubungan istimewa	2.186	0,56	9.713	1,73	11.761	1,64	11.021	1,26	20.215	1,73	27.123	2,17
Pinak ketiga	391.337	99,44	552.813	98,27	706.355	98,36	865.592	98,74	1.151.632	98,27	1.222.220	97,83
Jumlah	393.523	100	562.525	100	718.116	100	876.613	100	1.171.846	100	1.249.343	100

TABEL PORTOFOLIO KREDIT BERDASARKAN KOLEKTIBILITAS*(dalam jutaan Rupiah)*

Kategori Kolektibilitas	1993	1994	1995	1996	1997	31 Agt 1998*
Lancar	378.860	546.869	697.924	854.283	1.148.356	1.128.829
Dalam perhatian khusus	-	-	-	-	-	41.799
Kurang lancar	2.547	5.356	7.348	6.204	3.816	32.720
Diragukan	8.638	3.859	6.847	7.368	9.407	32.444
Macet	3.478	6.441	5.997	8.758	10.267	13.551
Jumlah	393.523	562.525	718.116	876.613	1.171.846	1.249.343

* Berdasarkan SE BI No. 30/16/UPPB tanggal 27 Februari 1998. Untuk tahun 1993-1997 berdasarkan SE BI No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993.

Kredit merupakan komponen asset produktif yang utama bagi perbankan. Oleh karenanya Perseroan senantiasa berpedoman pada prinsip kehati-hatian didalam menyalurkan kreditnya. Untuk itu Perseroan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut :

- Membentuk Komite Kebijakan Perkreditan untuk menetapkan strategi dan arah perkreditan yang tepat dan sehat dengan memperhatikan aspek hukum, distribusi/komposisi penyalurannya pada sektor usaha, jangka waktu dan segmen pasar.
- Membentuk Komite Kredit pada masing-masing kantor operasional dan kantor pusat untuk menerapkan prosedur pemberian kredit yang hati-hati. Setiap Komite Kredit minimum terdiri dari tiga orang yang bertugas untuk mengambil keputusan berdasarkan analisa kualitatif maupun analisa kuantitatif yang memadai.
- Menjaga rasio penyaluran kredit terhadap sumber dana (LDR) agar selalu berada dalam tingkat yang sehat, dan senantiasa mematuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit yang berlaku sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, serta membantu program pemerintah dalam menyalurkan Kredit Usaha Kecil (KUK) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- Memelihara cadangan penyisihan kredit yang cukup sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia

2.3. Kegiatan Lain-Lain

Kegiatan-kegiatan lainnya yang ikut mendukung kegiatan utama Perseroan adalah sebagai berikut :

2.3.1. Kerjasama dengan pihak lain

- Kerjasama dengan Lembaga Keuangan dari Belanda (FMO : Nederlandsche Financiering Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V.) dalam rangka pendanaan untuk penyaluran Kredit Usaha Kecil.
- Kerjasama dengan USAID, yaitu Lembaga Bantuan dari Amerika Serikat, mengikuti program garansi kredit ekspor yang diselenggarakan oleh United States Department of Agriculture (USDA).

- Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Dunia (IFC : International Finance Corporation) dalam rangka pendanaan untuk penyaluran Kredit Usaha Kecil.
- Kerjasama dalam bentuk *technical assistant* dan kepemilikan saham di PT. Bank Daiwa Perdania.
- Kerjasama dengan OCBC Bank Ltd dari Singapura dalam bentuk Bank Patungan "Bank OCBC - NISP".
- Kerjasama dengan jaringan ATM Bersama yang dikelola oleh PT. Aplikanusa Lintasarta dengan beberapa bank dalam penyediaan fasilitas ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

2.3.2. Penambahan Jaringan Kantor Cabang

Untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan untuk meningkatkan kegiatan usaha, Perseroan merencanakan untuk memperluas jaringan kantornya menjadi sekitar 60 kantor sampai dengan akhir tahun 1998. Jaringan kantor tersebut akan didukung oleh jaringan on-line dan ATM.

2.3.3. Sistem Manajemen Mutu

Perseroan menyadari bahwa didalam menjalankan kegiatan usaha perlu adanya sistem manajemen yang baik untuk mendukung kualitas pekerjaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Sebagai bukti atas komitmennya terhadap mutu, pada akhir Januari 1997 yang lalu, seluruh satuan kerja di Kantor Pusat Bank NISP berhasil mendapatkan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9002 dan penerapan Sistem Manajemen Mutu ini akan diteruskan keseluruh kantor operasional Bank NISP.

Disamping itu, Bank NISP juga terus-menerus meningkatkan kualitas pelayanannya bagi para pelanggannya dengan mengadakan Program Peningkatan Pelayanan (Service Quality Program). Sedangkan untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, Bank NISP melaksanakan Program GKM (Gugus Kendali Mutu atau Quality Control Circle).

2.3.4. Pengembangan Sistem Informasi

Pesatnya perkembangan teknologi telah disadari oleh perusahaan. Oleh karena itu Perseroan membentuk Komite Pengembangan Sistem Informasi untuk menentukan detail dan arah pengembangan sistem informasi yang akan dicapai, yaitu :

- Teknologi yang menunjang pelayanan dengan penyediaan data bagi kepentingan sistem informasi manajemen.
- Sistem Informasi yang mendukung pengembangan produk dan pelayanan, baik yang sudah ada maupun yang baru.
- Sistem Informasi yang ditujukan bagi peningkatan efisiensi dan efektivitas serta mendukung bidang pengawasan.
- Pembakuan sistem dan prosedur operasional untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kerja dan fungsi kontrol yang lebih baik, sejalan dengan penyempurnaan sistem informasi.

Persiapan Menghadapi "Millenium" Baru Tahun 2000

- Didalam menghadapi "millenium" baru tahun 2000, Bank NISP telah mempersiapkan masalah-masalah Teknologi Sistem Informasi yang mungkin timbul pada saat pergantian ke tahun 2000 yang dikenal dengan istilah *millenium bug*.

Dari Segi Hardware

- Ditinjau dari segi hardware, Bank NISP telah melakukan persiapan terhadap sistem komputerisasinya, dimana hampir seluruh komputer yang digunakan di Bank NISP berbasis Personal Computer yang mayoritas dibeli di atas tahun 1996, yang mana secara teoritis komputer-komputer tersebut secara spesifikasi telah dipersiapkan menjadi "year 2000 compliant" oleh pembuatnya.

Dari Segi Software

- Program aplikasi yang digunakan Bank NISP dalam Sistem Komputerisasi Operasional Perbankannya dibuat secara in-house. Program aplikasi yang saat ini digunakan dibuat pada tahun 1996, sehingga pada saat didisain program ini telah dipersiapkan menjadi "year 2000 compliant". Program tersebut telah mengalami perubahan secara mendasar dari bentuk modular dengan Clipper, menjadi integrated dengan teknologi baru Client/Server. Program ini juga secara kontinu terus di-upgrade untuk menambah feature-feature baru dan modifikasi lain yang diperlukan.
- Program aplikasi tersebut dibuat dengan software-software versi terbaru yang telah dinyatakan "year 2000 compliant" oleh penerbitnya, diantaranya Sybase versi X dan XI, SQL windows versi 5.0.2 dan 5.0.3, Novell Netware versi 4.10 dan 4.11 Bank NISP telah mempersiapkan masalah-masalah.

2.3.5. Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari peran dari sumber daya manusia sangat penting didalam menentukan keberhasilan Perseroan. Oleh karena itu Perseroan membentuk Team Pengembangan Organisasi yang secara khusus bertujuan untuk mendefinisikan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Sumber Daya Manusia, baik di kantor pusat dan kantor-kantor cabang untuk lebih meningkatkan kemampuan dan kualitas dari sumber daya manusia yang dimiliki Perseroan.

Sejalan dengan tuntutan perubahan, beberapa hal yang telah mulai diimplementasikan antara lain meliputi perubahan struktur organisasi, sistematika pelatihan, remunerasi dan penyempurnaan job description.

2.4. Kegiatan Perusahaan Afiliasi

PT. Daiwa Perdania Bank

PT. Daiwa Perdania Bank, yang merupakan bank campuran antara Daiwa Bank Ltd, Japan dengan partner lokal, semula bernama PT. Bank Perdania. Didirikan pada tahun 1953 dengan kegiatan usaha dalam bidang perbankan, dan merupakan bank yang dikelola dengan baik.

Berikut ini adalah tabel ringkasan laporan keuangan PT. Daiwa Perdania Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 1995, 1996 dan 1997 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendra Winata dan Rekan.

(dalam jutaan Rupiah)

	1995	% pertumbuhan	1996	% pertumbuhan	1997
Total aktiva	960.647	12,63%	1.081.946	52,71%	1.652.288
Total kewajiban	779.653	12,66%	878.332	61,63%	1.419.613
Total ekuitas	180.994	12,50%	203.614	14,27%	232.675
Pendapatan operasional	110.429	-3,89%	106.130	40,06%	148.649
Beban operasional	74.756	-9,12%	67.937	51,60%	102.992
Laba operasional	35.673	7,06%	38.193	19,54%	45.657
Laba bersih	26.812	5,92%	28.400	19,94%	34.063

PT. Bank OCBC - NISP

PT Bank OCBC-NISP yang merupakan bank campuran hasil kerjasama Perseroan dengan OCBC Bank Ltd dari Singapura memulai operasinya pada tahun 1997. OCBC Bank Ltd didirikan pada tahun 1932 dan merupakan salah satu bank terbesar di Singapura. Menurut majalah terkemuka di Asia "Asiaweek" edisi tanggal 13 September 1996, berdasarkan hasil pemeringkatannya menempatkan OCBC Ltd sebagai bank terbesar ke-3 di Singapura. OCBC Bank Ltd ini mempunyai jaringan luas yang tersebar di manca negara seperti Australia, Hongkong, Jepang, Malaysia, Cina, Korea, Thailand, Myanmar, Filipina, Inggris dan Amerika Serikat.

Perseroan memiliki penyertaan senilai Rp. 22.500.000.000,- (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) atau merupakan 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh PT Bank OCBC-NISP.

Berhubung PT Bank OCBC-NISP baru beroperasi pada tahun 1997, maka tabel ringkasan laporan keuangan yang akan disajikan dibawah ini hanya memuat laporan keuangan per tanggal 31 Desember 1997, sebagaimana telah diaudit oleh Akuntan Publik Drs. Hadi Susanto & Rekan Price Waterhouse.

(dalam jutaan Rupiah)

	1997
Total aktiva	215.976
Total kewajiban	62.422
Total ekuitas	153.554
Pendapatan operasional	23.155
Beban operasional	14.641
Laba operasional	8.514
Laba bersih	4.077

PT. Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia

PT. Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia merupakan Lembaga keuangan non-bank yang dimiliki oleh 6 Bank Pemerintah dan 47 Bank Swasta Nasional yang bertujuan untuk mengerahkan dana dengan maksud mengembangkan perusahaan-perusahaan nasional guna meningkatkan perkembangan ekonomi Indonesia dalam arti kata seluas-luasnya.

Berikut ini adalah tabel laporan keuangan PT. Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia per tanggal 31 Desember 1995, 1996 dan 1997.

(dalam jutaan Rupiah)

	1995	% pertumbuhan	1996	% pertumbuhan	1997
Total aktiva	10.946	-1,49%	10.783	13,30%	12.217
Total kewajiban	312	12,18%	350	19,43%	418
Total ekuitas	10.634	-1,89%	10.433	13,10%	11.800
Pendapatan	1.406	19,27%	1.677	6,86%	1.792
Beban usaha	20	5,00%	21	9,52%	23
Laba bersih	1.068	22,28%	1.306	8,81%	1.421

* Laporan keuangan per 31 Desember 1996 tidak diaudit

3. PEMASARAN

Perseroan memfokuskan target pasarnya pada segmen usaha kecil dan menengah, terutama di daerah Jawa Barat dan Jabotabek, dimana Perseroan telah dikenal dengan baik. Perseroan juga menyadari bahwa era globalisasi sudah semakin dekat, artinya persaingan di sektor perbankan akan semakin ketat, oleh karena itu Perseroan akan memperluas jaringan kantornya ke daerah-daerah yang berpotensi, dengan meningkatkan fleksibilitas produk dan jasa perbankan tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian yang selama ini menjadi ciri utama strategi perseroan.

Untuk persaingan yang ketat itu, Perseroan telah membangun landasan kerjasama yang erat dengan bank-bank asing untuk saling mengisi dalam hal menangani proyek-proyek yang besar atau mendapatkan sumber pendanaan yang lebih kompetitif.

Perseroan sebagai Bank Devisa dalam menghimpun dana menawarkan berbagai ragam produk antara lain berupa Giro Rupiah maupun Valuta Asing, Deposito Rupiah maupun Valuta Asing, Sertifikat Deposito, Tabanas, Tabungan Harian, Tabungan Visi Save NISP, Tabungan berhadiah H plus H, dan Tabungan Berjangka. Salah satu strategi untuk menggalakkan penghimpunan dana ini adalah dengan intensifikasi penabung-penabung lama dan deponan-deponan lama.

(dalam jutaan Rupiah)

Dana Pihak Ketiga	1993		1994		1995		1996		1997		31 Agustus 1998	
	Jumlah	%	Jumlah	%								
Giro	51.459	13	65.293	13	72.890	11	76.455	8	113.808	12	232.445	12
a. Rupiah	50.666		62.834		70.122		71.018		84.766		148.091	
b. Valas	793		2.459		2.768		5.437		29.042		84.354	
Tabungan	102.230	25	123.862	25	133.310	21	172.714	19	171.422	19	208.877	11
Deposito	252.977	62	311.061	62	433.714	68	673.220	73	624.379	69	1.482.834	77
a. Rupiah	206.027		239.305		369.226		572.140		446.138		1.211.431	
b. Valas	46.950		71.756		64.488		101.080		178.241		271.403	
Jumlah	406.667	100	500.216	100	639.914	100	922.389	100	909.609	100	1.924.156	100

TABEL : DANA PIHAK KETIGA

Disamping dana-dana dari masyarakat, Perseroan juga memanfaatkan dana-dana dari sumber lainnya berupa instrumen pasar uang (Medium Term Notes dan Obligasi) maupun pinjaman dari Bank Pembangunan Belanda (FMO), International Finance Corporation (IFC), Brusel Lambert Bank, Fuji Bank, ING Bank, Overseas Chinese Banking Corporation Singapore, Indover Bank Amsterdam dan Daiwa Bank Limited, Hongkong.

Perseroan menawarkan kredit modal kerja, kredit investasi, KPR dan pinjaman lainnya dalam mata uang rupiah dan valuta asing.

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung pemasaran produk adalah unsur pelayanan yang tepat, cepat dan ramah tanpa mengurangi sikap kehati-hatian. Disamping berusaha terus meningkatkan Sumber Daya Manusia, dipersiapkan pula elemen-elemen penunjang lainnya, yaitu perangkat-perangkat pendukung dibidang teknologi, perluasan jaringan koresponden, serta penyediaan ATM (Automated Teller Machine) di berbagai kantor cabang Perseroan. Upaya lain untuk meningkatkan pelayanan adalah dengan pembukaan kantor-kantor operasional di tempat-tempat yang strategis.

Dengan melakukan strategi-strategi di atas, Perseroan berhasil meningkatkan dana pihak ketiganya dengan mencatat tingkat pertumbuhan yang cukup besar. Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun pada tahun 1997 sebesar Rp. 909,6 miliar. Ditahun 1998, total dana yang berhasil dihimpun per tanggal 31 Agustus 1998 sebesar Rp. 1.924,2 miliar atau meningkat sekitar 111,54 % dari posisi akhir tahun 1997. Hal ini menunjukkan masih terjaganya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank NISP.

Penyaluran dana kedalam aktiva-aktiva yang sifatnya produktif, juga mengalami peningkatan. Ditahun 1997, Perseroan membukukan total aktiva produktif sebesar Rp. 1.463,6 miliar. Per tanggal 31 Agustus 1998, total aktiva produktif mengalami peningkatan sebesar 74% dibandingkan dengan posisi akhir tahun 1997 sehingga nilainya mencapai Rp. 2.546,77 miliar. Peningkatan yang pesat ditahun 1998 terutama disebabkan oleh peningkatan pada penempatan dalam aktiva likuid, yaitu dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia dan penempatan dalam pasar uang jangka pendek lainnya. Sementara kenaikan dalam pemberian kredit lebih dipengaruhi oleh faktor karena naiknya kredit valuta asing sebagai akibat menurunnya nilai tukar rupiah.

Keberhasilan Perseroan di dalam memasarkan produknya, dapat diukur melalui pencapaian laba bersih yang diperoleh Perseroan pada setiap tahunnya. Pada tahun 1995 Perseroan mencatat laba bersih sebesar Rp. 16,5 miliar dan ditahun 1996 mengalami peningkatan sebesar 12,76% menjadi Rp. 18,6 miliar. Selanjutnya ditahun 1997, Perseroan mencatat peningkatan laba bersih sebesar 29,75% menjadi Rp. 24,2 miliar. Selama 8 bulan berjalan ditahun 1998 ini, laba bersih Perseroan telah mencapai Rp. 16,09 miliar

Jenis produk dan dan kredit yang dimiliki Perseroan (terlampir).

Berikut tabel perkembangan usaha Perseroan selama 5 tahun terakhir :

4. TINGKAT KESEHATAN

Tingkat Kesehatan Bank NISP selama 24 bulan dan 12 bulan terakhir dinyatakan SEHAT oleh Bank Indonesia, sebagaimana tercantum dalam surat Bank Indonesia nomor 31/1/UPWB1/AdWB1, tanggal 7 Agustus 1998.

Berbagai peraturan yang berlaku bagi perbankan di Indonesia pada dasarnya adalah untuk menciptakan iklim perbankan nasional yang sehat. Peraturan-Peraturan tersebut antara lain mencakup ketentuan mengenai Rasio Pinjaman Terhadap Dana Pihak Ketiga (Loan to Deposit Ratio - LDR), Kewajiban Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio - CAR), Batas Maksimum Pemberian Kredit (Legal Lending Limit - LLL) serta Posisi Devisa Netto (Net Open Position - NOP).

Untuk memperkecil kemungkinan munculnya aktiva produktif bermasalah, dibentuk unit kerja khusus yang menangani penagihan dan pemeliharaan kredit sehingga membantu didalam menurunkan jumlah kredit bermasalah. Perseroan juga membatasi transaksi valuta asing agar selalu terpelihara posisi devisa netto yang aman, memperkecil risiko kredit dengan menetapkan limit pemberian kredit, berusaha mencapai kegiatan operasional yang efisien agar diperoleh rentabilitas optimal dan senantiasa memperhatikan kecukupan likuiditas.

Rasio Kecukupan Modal

Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia terakhir ditetapkan bahwa bank-bank diwajibkan memiliki perbandingan jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko minimum sebesar 9%. Namun berkenaan dengan krisis ekonomi yang melanda seluruh sektor dunia usaha, termasuk sektor perbankan, maka Bank Indonesia menetapkan ketentuan kecukupan modal sebagai berikut : 4% sampai akhir tahun 1998, 8% sampai akhir tahun 1999, 10% sampai akhir tahun 2000.

Perseroan berhasil mencapai rasio CAR melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. CAR pada tahun 1996, 1997 dan per 31 Agustus 1998 adalah : 14,30%; 13,69%; 10,52%.

Rasio Cadangan Wajib Minimum

Kemampuan Perseroan dalam membiayai aktiva lancar telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM). Sebelumnya ketentuan GWM adalah 2%, kemudian sejak 16 Februari 1998 ditingkatkan menjadi 3%, dan sejak April 1997 menjadi 5%.

Prosentase GWM pada tahun 1996, 1997 dan per 31 Agustus 1998 secara berturut-turut adalah : 6,70%; 5,70%; 5,29%.

Ratio Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Dalam operasional sehari-hari Perseroan selalu memperhatikan kualitas aktiva produktif, terutama diakhir tahun 1997 dan awal tahun 1998, dimana kondisi ekonomi sangat tidak mendukung yang ditandai dengan tingginya tingkat suku bunga yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas aktiva produktif. Namun demikian dalam kondisi yang sulit ini, Perseroan masih dapat memelihara ratio KAP-nya pada tingkat yang relatif baik, yakni per 31 Agustus 1998 sebesar 4,70 %.

Posisi Devisa Netto (PDN)

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia nomor 24/11/UD tanggal 20 November 1991, pengertian Posisi Devisa Netto (PDN) adalah selisih bersih antara aktiva dan pasiva dalam mata uang asing, setelah memperhitungkan rekening-rekening administratif (off balance sheet). Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan iklim perbankan yang sehat melalui pengendalian tingkat risiko bank berkenaan dengan kegiatan transaksi mata uang asing.

Bank Indonesia menetapkan bahwa rata-rata selisih aktiva dan kewajiban dalam valuta asing setinggi-tingginya 25% dari modal bank. Perseroan selalu memperhatikan ketentuan tersebut dengan memelihara Posisi Devisa Nettanya berturut-turut : 1,85% pada tahun 1996, 13,94% pada tahun 1997 dan 4,81% per 31 Agustus 1998.

Kredit Usaha Kecil

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/4/KEP/DIR tanggal 4 April 1997 ditetapkan bahwa Kredit Usaha Kecil adalah Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja yang diberikan dalam Rupiah dan/atau Valuta Asing kepada nasabah usaha kecil dengan plafond kredit keseluruhan maksimum Rp. 350.000.000,- dan ditujukan untuk membiayai kegiatan usaha yang produktif.

Terhitung sejak tahun 1997, kewajiban bank dalam menyalurkan KUK adalah sebesar 22,5% - 25% dari jumlah ekspansi kredit netto, termasuk surat berharga yang diberikan dalam Rupiah dan Valuta Asing setiap tahun takwim. Sebelumnya ketentuan dari rasio KUK adalah 20% dari posisi kredit yang diberikan.

Dalam keadaan nilai tukar yang stabil ketentuan BI tersebut sangatlah mudah diterapkan oleh Perseroan mengingat mayoritas kredit yang disalurkan oleh Perseroan merupakan Kredit Usaha Kecil. Namun, dengan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, dimana terdepresiasi lebih dari 100%, maka dampak kenaikan kurs ini mengakibatkan rasio penyebut dalam perhitungan KUK meningkat tanpa diiringi oleh peningkatan pada jumlah penyaluran kreditnya, sehingga rasio KUK ini menjadi bias apabila dihitung dari kenaikan nilai kredit tanpa memisahkan secara detail kenaikan nilai kredit apakah dari pertumbuhan atau kenaikan kurs. Mayoritas penyaluran kredit Perseroan dalam tahun 1997 merupakan Kredit Usaha Kecil, dan hal ini sejalan dengan diterimanya dana kelolaan dari Bank Indonesia bekerjasama dengan Bank EXIM Jepang.

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah pembatasan persentase jumlah kredit yang diberikan sebuah bank kepada suatu pihak atau suatu grup. Bank Indonesia pada tanggal 29 Mei 1993 telah menetapkan bahwa BMPK suatu bank adalah sebesar 20% dari modal bank bila diberikan kepada suatu pihak atau sebuah grup yang tidak terkait dengan bank, dan maksimum 10% dari modal bank, bila diberikan kepada pihak atau grup yang terkait dengan bank.

Dalam rangka pembatasan BMPK ini, di tahun 1998 Perseroan tidak menambah kredit-kredit kepada group terkait maupun tidak terkait yang sudah ada bahkan sebaliknya berusaha menurunkan. Sebagai akibat dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing lainnya, hal ini telah mengakibatkan kredit dalam USD yang ada menjadi meningkat secara signifikan jumlahnya apabila dikonversikan kedalam nilai Rupiah, sehingga seakan-akan terlihat melanggar BMPK. Menyadari hal ini, Perseroan terus mengupayakan secara maksimal untuk menurunkan jumlah kredit kepada group maupun kepada pihak terkait, sehingga per bulan Nopember 1998, kredit yang disalurkan kepada pihak terkait tidak lagi melanggar BMPK.

5. PROSPEK USAHA

Perekonomian Indonesia

Perekonomian Indonesia dalam triwulan I tahun 1998 menunjukkan perkembangan yang kurang baik. Sektor produksi yang sejak tahun 1990-an lebih berorientasi domestik sangat terpukul dengan memburuknya tingkat inflasi dan tingginya suku bunga.

Sisi pembiayaan luar negeri menghadapi kesulitan dengan terus melemahnya nilai tukar Rupiah dan menurunnya kepercayaan dunia internasional terhadap prospek dan kemampuan ekonomi Indonesia dalam menghadapi gejolak keuangan.

Pada gilirannya, perkembangan tersebut berdampak pula pada sektor keuangan, khususnya perbankan, yang ditambah dengan rendahnya kepercayaan masyarakat.

Namun demikian, melemahnya nilai tukar telah mempengaruhi kinerja ekspor dan impor non-migas secara positif. Volume ekspor non-migas pada umumnya menunjukkan peningkatan, sedangkan impor menjadi lebih selektif.

Upaya pemulihan ekonomi dibidang moneter terutama dilakukan dengan menempuh kebijakan pengetatan likuiditas melalui penyesuaian suku bunga SBI. Kenaikan Suku bunga SBI dimaksudkan untuk mengurangi tekanan yang berlebihan dari peningkatan jumlah uang beredar terhadap nilai tukar Rupiah dan laju inflasi.

Pertumbuhan tahunan baik uang primer M1 dan M2 meningkat tajam. Pertumbuhan tahunan uang primer meningkat dari 32,5% pada akhir triwulan IV tahun 1997 menjadi 64,2% pada triwulan pertama tahun 1998, hal ini terutama disebabkan oleh adanya bantuan likuiditas dari Bank Indonesia terhadap perbankan nasional yang mengalami krisis likuiditas sebagai pelaksanaan dari program

penjaminan pemerintah, pertumbuhan uang primer yang tinggi tersebut berakibat pula pada peningkatan pertumbuhan M1 dan M2 yaitu masing-masing menjadi 54,6% dan 52,7% dibandingkan dengan pertumbuhan sebelumnya sebesar 22,2% dan 23,2%.

Dari gambaran diatas, jelaslah bahwa tantangan masih terbentang dihadapan kita, namun karena tantangan itu pula membuat jasa perbankan yang benar-benar sehat akan semakin dibutuhkan peranannya.

Kondisi Industri Perbankan

Banyak bank mencatat penurunan pendapatan dan mengalami kesulitan likuiditas dalam triwulan I tahun 1998. Penurunan pendapatan tersebut berkaitan erat dengan lesunya kegiatan ekonomi yang disertai dengan membengkaknya nilai Rupiah dari kewajiban valuta asing perbankan, sementara kesulitan likuiditas disebabkan oleh belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan ketatnya likuiditas di pasar uang.

Pada gilirannya kondisi ini mendorong terjadinya pelanggaran ketentuan perbankan antara lain dalam bentuk kekurangan giro wajib minimum dan saldo negatif pada Bank Indonesia. Oleh sebab itu sebagai konsekuensi dari pelaksanaan penjaminan pemerintah dalam rangka mengamankan sistem perbankan nasional, Bank Indonesia terpaksa memberikan bantuan likuiditas kepada sejumlah bank yang mengalami kesulitan tersebut dengan persyaratan yang ketat.

Untuk memperlancar upaya penyehatan perbankan nasional agar sesuai dengan standar internasional, Pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang mempunyai kewenangan penuh dalam melakukan pengawasan terhadap bank-bank yang memerlukan program penyehatan termasuk pengelolaan aset bank selama penyehatan. Dalam pada itu dengan timbulnya fenomena *flight to currency dan flight to quality* dalam sistem perbankan. Pemerintah memutuskan untuk memberikan jaminan baik kepada depositor maupun kreditor serta terhadap L/C yang diterbitkan oleh bank nasional yang berbadan hukum Indonesia.

Memburuknya kondisi ekonomi nasional tersebut melanda semua sektor perekonomian, yang akhirnya akan merugikan perbankan nasional, terutama dalam hal kredit bermasalah yang akan meningkat.

Prospek bagi Perseroan

Kondisi perekonomian Indonesia, dan kondisi perbankan nasional seperti yang disebutkan di atas, tengah mengalami kondisi yang buruk, namun ditengah-tengah krisis tersebut Perseroan masih tetap bertahan dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- Dilihat dari sumber pendanaan, Perseroan memiliki komposisi pendanaan jangka panjang dalam rupiah dan valuta asing yang cukup sehingga tidak sampai terjadi kekurangan likuiditas.
- Dilihat dari biaya dana yang relatif tinggi saat ini, Perseroan memiliki komposisi pendanaan dengan tingkat bunga tetap, yang diperoleh saat bunga rendah, sehingga memungkinkan Perseroan untuk dapat memberikan subsidi bunga terhadap penyaluran kredit dengan tujuan tetap menjaga kualitasnya agar jangan sampai terjadi kemacetan.
- Perseroan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari penabung dan deposannya, sehingga tetap dapat mengembangkan usahanya dengan baik, bahkan melebihi situasi normal.
- Dampak dari menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, tidak memperburuk kondisi Bank, dikarenakan tagihan Perseroan dalam valuta asing melebihi kewajibannya dalam valuta asing, ditambah pula kewajiban dalam valuta asing rata-rata berjangka cukup panjang, sehingga tidak memerlukan likuiditas valuta asing yang mendesak.
- Dengan meningkatnya kegiatan ekspor non migas, telah ditunjuk 21 Bank Pelaksana Kredit Ekspor, dimana Perseroan termasuk di dalamnya.

- Kebijakan pengetatan rupiah, menguntungkan Perseroan yang memiliki kelebihan likuiditas yang tinggi, bahkan hasil yang diperoleh dari kelebihan likuiditas tersebut dapat digunakan untuk memberikan subsidi bunga kepada debiturnya.

Dari data diatas dapat dikatakan bahwa dengan memburuknya situasi perekonomian, masih terbuka jalan bagi Perseroan untuk tetap tumbuh dan Perseroan akan tetap yakin mampu melewati krisis ekonomi ini dengan tetap tumbuh baik.

6. LAIN-LAIN

- Menyangkut pemenuhan kewajiban perpajakan, selama ini Perseroan selalu memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan. Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Fiskal Nomor : SR-159/WPJ.06/BD.0301/1998, tanggal 28 Oktober 1998, diterangkan bahwa sampai dengan tahun buku 1997, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak atas seluruh kewajiban PPh, PPN maupun PBB.
- Berkenaan dengan perkara-perkara yang saat ini tengah dihadapi oleh Perseroan, hingga tanggal dikeluarkannya laporan pemeriksaan hukum per tanggal 8 Desember 1998, Perseroan terlibat dalam 6 perkara sebagai tergugat dan 5 perkara sebagai penggugat. Dan perkara-perkara tersebut secara materiil tidak mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah gambaran ikhtisar data keuangan penting Perseroan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 dan 31 Agustus 1998 yang disarikan dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Drs. Robert Yogi dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian untuk seluruh laporan keuangan yang disajikan pada tabel dibawah ini.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING PERSEROAN

NERACA	1993	1994	1995	1996	1997	31 Agustus 1998
Total Aktiva	463.215	655.344	875.313	1.198.930	1.703.667	2.878.337
Penempatan Pada Bank Lain (bersih)	18.143	6.093	56.664	91.498	119.750	306.445
Surat-Surat Berharga (bersih)	4.812	15.196	12.290	53.175	130.467	949.554
Kredit yang diberikan (bersih)	387.560	554.971	709.086	866.851	1.152.754	1.190.378
Penyertaan Saham (bersih)	2.327	14.740	15.933	17.365	41.416	41.416
Jumlah Aktiva produktif	418.844	598.958	803.114	1.038.747	1.463.576	2.546.763
Cadangan Aktiva produktif	6.003	7.958	9.141	9.858	19.188	58.970
Total Kewajiban	437.960	553.067	759.634	1.070.863	1.530.591	2.699.857
Dana Pihak Ketiga	406.667	500.216	639.914	922.389	909.609	1.924.156
Giro	51.459	65.293	72.890	76.455	113.808	232.445
Deposito Berjangka	249.628	308.047	430.748	669.676	620.593	1.342.525
Sertifikat Deposito	3.350	3.014	2.966	3.544	3.786	140.310
Tabungan	102.230	123.862	133.310	172.714	171.422	208.877
Pinjaman Yang Diterima	15.974**	34.674	96.653	125.108**	421.247**	530.741
Modal sendiri	25.255	102.277	115.679	128.066	173.076	178.480
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	463.215	655.344	875.313	1.198.930	1.703.667	2.878.337

**) termasuk pinjaman Subordinasi
 tahun 1993 Rp. 10.550 juta (USD 5,000,000)
 tahun 1996 Rp. 27.404 juta (USD 11,500,000)
 tahun 1997 Rp. 42.780 juta (USD 9,200,000)

(dalam jutaan rupiah kecuali laba per saham)

PERHITUNGAN LABA RUGI	1993	1994	1995	1996	1997	31 Agustus 1998
Pendapatan Bunga	80.925	89.073	138.468	169.009	247.016	412.089
Beban Bunga	55.884	50.141	85.214	114.614	174.203	321.625
Pendapatan Bunga Netto	25.041	38.932	53.254	54.395	72.813	90.464
Pendapatan Lainnya	3.011	6.533	8.890	10.542	31.606	12.528
Beban Lainnya	22.371	29.347	39.122	39.146	70.444	82.066
Laba Operasional	5.758	15.422	22.764	25.755	34.927	20.589
Pajak Penghasilan	1.145	2.597	6.494	7.154	9.793	4.837
Laba Bersih	4.535	13.521	16.528	18.637	24.182	16.089
Laba Operasional per saham (Rp) *	19	52	77	87	118	70
Laba bersih per saham (Rp) *	15	46	56	63	82	54

*) dihitung berdasarkan metode rata-rata tertimbang dari jumlah saham yang beredar setelah memperhitungkan secara retroaktif pengaruh dari saham bonus dan dividen saham yang akan terjadi dalam tahun 1998

RASIO KEUANGAN	1993	1994	1995	1996	1997	31 Agustus 1998**)
Rasio-Rasio Pertumbuhan (%)						
Pendapatan Bunga	5,01	10,07	55,45	22,06	46,16	207,95
Beban Bunga	0,25	-10,28	69,95	34,50	51,99	231,95
Pendapatan Bunga Bersih	17,46	55,48	36,79	2,14	33,86	144,99
Laba Operasional	88,08	167,83	47,61	13,14	35,61	13,88
Laba bersih	103,66	198,15	22,24	12,76	29,75	27,55
Kredit Yang Diberikan (bersih)	25,52	43,20	27,77	22,25	32,98	16,70
Jumlah Aktiva	21,38	41,48	33,57	36,97	42,10	96,95
Rasio Usaha (%)						
Pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata aktiva	5,93	6,96	6,96	5,24	5,02	6,25
Beban bunga terhadap rata-rata aktiva	13,23	8,97	11,13	11,05	12,00	22,23
Laba sebelum pajak penghasilan terhadap rata-rata aktiva	1,34	2,88	3,01	2,49	2,34	1,45
Laba bersih terhadap rata-rata aktiva	1,07	2,42	2,16	1,80	1,67	1,11
Laba bersih terhadap rata-rata Ekuitas	19,73	21,20	15,17	15,29	16,06	15,44
Jumlah Kewajiban terhadap Ekuitas (X)	17,34X	5,41X	6,57 X	8,36 X	8,84 X	15,13 X
Jumlah kewajiban terhadap aktiva	94,55	84,39	86,78	89,32	89,84	93,80
Ekuitas rata-rata terhadap aktiva rata-rata Modal Minimum Terhadap Aktiva	5,44	11,40	14,24	11,75	10,37	7,20
Tertimbang Menurut Resiko (CAR) *	8,31	15,39	13,74	14,30	13,69	10,52
LDR *	90,13	88,36	87,54	79,20	75,38	45,28
Kemampuan Membayar Bunga	1,10x	1,32x	1,28 x	1,23 x	1,20x	1,07 X

*) sesuai ketentuan Bank Indonesia

**) dibandingkan terhadap posisi Agustus 1997

X. EKUITAS

Tabel dibawah ini menunjukkan perkembangan posisi Ekuitas PT. Bank NISP Tbk. untuk masa delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 1998 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1997 dan 1996 yang angkanya diambil dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Robert Yogi, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

	31 Agustus 1998 Rp. miliar	31 Des 1997 Rp. miliar	31 Des 1996 Rp. miliar
Modal ditempatkan dan disetor penuh	87,50	87,50	62,50
Agio Saham	1,25	1,25	26,25
Selisih penilaian kembali aktiva tetap	27,69	26,95	-
Saldo laba	62,04	57,37	39,32
Jumlah Ekuitas	178,48	173,07	128,07

1. Berdasarkan akta no. 138 tanggal 25 September 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, SH, perusahaan telah merubah anggaran dasar Perseroan.

- Meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) menjadi Rp. 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar rupiah)
- Memecah nilai nominal saham dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per saham menjadi Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per saham
- Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp. 62.500.000.000,- menjadi Rp. 87.500.000.000,-

Adapun peningkatan modal ditempatkan disetor penuh menjadi Rp. 87.500.000.000,- yang terdiri atas 175.000.000 saham dilakukan dengan :

- Melakukan stock split/pemecahan nilai nominal saham.
- Kapitalisasi agio saham menjadi modal sebesar Rp. 25.000.000.000,- dengan membagikan saham bonus.

Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C.2-9290.HY.01.04 Th 94 tanggal 16 Juni 1994.

2. Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana tercantum dalam akta No. 95 tanggal 29 Juni 1998 yang dibuat oleh notaris Ny. Indah Fatmawati, SH sebagai pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH telah memutuskan dan menyetujui antara lain :

- Perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Paraturan Pelaksanaannya.
- Meningkatkan modal dasar dari Rp. 350 miliar yang terbagi atas 700 juta saham menjadi Rp. 500 miliar yang terbagi atas 1 miliar saham dengan nilai nominal Rp. 500,- per saham
- Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp. 87.500.000.000,- menjadi Rp. 147.875.000.000,-

Adapun peningkatan Modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp. 147.875.000.000,- berasal dari :

- Kapitalisasi saldo laba per 31 Desember 1997 menjadi modal sebesar Rp. 31.500.000.000,-
- Kapitalisasi sisa agio saham yang merupakan hasil dari penawaran umum tahun 1994 sebesar Rp. 1.188.787.740,- dan selisih penilaian kembali aktiva tetap sebesar Rp. 27.686.212.260,-

Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-10.358 HT.01.04.Th.98 tanggal 5 Agustus 1998.

3. Seandainya pembagian dividen saham dan saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham dan selisih penilaian kembali aktiva tetap terjadi pada tanggal 31 Agustus 1998, dan seandainya Penawaran Umum Terbatas I dengan perbandingan 1.183 saham lama memiliki hak untuk 1.200 saham baru, maka untuk 295.750.000 saham lama Perseroan akan diterbitkan sejumlah 300.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp. 500,- per saham juga terjadi pada tanggal 31 Agustus 1998, maka struktur Ekuitas Perseroan secara proforma pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut :

Perkiraan	Modal Disetor	Agio Saham	Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
	Rp. miliar	Rp. miliar	Rp. miliar	Rp. miliar	Rp. miliar
Posisi dalam laporan keuangan pada 31 Agustus 1998.	87,50	1,25	27,69	62,04	178,48
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Agustus 1998. Seandainya perubahan terjadi pada tanggal tersebut.					
- Pembagian saham bonus	28,87	(1,18)	(27,69)	-	-
- Pembagian dividen saham	31,50	14,17	-	(45,67)	-
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Agustus 1998 sebelum Penawaran Umum Terbatas I	147,87	14,24	-	16,37	178,48
Seandainya Penawaran Umum Terbatas I dengan hak memesan efek terlebih dahulu pada tanggal 31 Agustus 1998	150,00	-	-	-	150,00
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Agustus 1998 sesudah Penawaran Umum Terbatas I dengan hak memesan efek terlebih dahulu pada tanggal 31 Agustus 1998.	297,87	14,24	-	16,37	328,48

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Saham yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal atas dividen dengan saham Perseroan lainnya yang telah disetor penuh.

Perseroan merencanakan untuk membayar dividen sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Besarnya dividen yang dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha, tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam menghadapi krisis ekonomi yang mengakibatkan perlunya penjaminan oleh Bank Indonesia terhadap dana nasabah, perbankan nasional yang mengikut sertakan diri dalam penjaminan tersebut dilarang membagikan dividen kas (tunai) kepada pemegang saham, selama penjaminan tersebut masih berlangsung, atau selama kewajiban bank tersebut terhadap Pemerintah belum terbayar, sepanjang bank tersebut tidak memenuhi ketentuan permodalan yang dipersyaratkan, kecuali ditentukan lain oleh BPPN. Ketentuan-ketentuan ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Keputusan Menteri Keuangan No. 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan diatas, Perseroan mempunyai kebijakan dividen tunai atas laba bersih setelah pajak yang akan diberlakukan kembali setelah ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat dipenuhi. Kebijakan tersebut yang telah diterapkan sejak tahun 1994 adalah sebagai berikut:

Laba Bersih Setelah Pajak	Dividen Kas Terhadap Laba Bersih Setelah Pajak (%)
Sampai dengan Rp. 30 miliar	20% - 30%
Lebih dari Rp. 30 miliar	31% - 40%

Sejak Penawaran Umum Perdana pada tahun 1994, Perseroan telah membayar dividen sebagai berikut:

Tahun Buku	Laba Bersih (Rp)	Jumlah Saham	Dividen per saham (Rp)	Jumlah Dividen (Rp)	Dividen Kas terhadap Laba Bersih (%)
1994	13.521.114.244	62.500.000	50	3.125.000.000	23,11%
1995	16.527.935.929	62.500.000	100	6.250.000.000	37,81%
1996	18.636.841.607	62.500.000	35	6.125.000.000	32,87%
1997	24.181.918.570	175.000.000	65,25	11.418.750.000	47,22%

XII. PERPAJAKAN

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tanggal 9 Nopember 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1991, penerimaan Dividen atau bagian laba yang diperoleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, untuk semua transaksi penjualan saham dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan untuk transaksi penjualan saham pendiri, kecuali saham pendiri perusahaan pasangan usaha yang dimiliki oleh perusahaan modal ventura, ditambah 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.

Pajak Penghasilan atas dividen diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994, tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan Dana Pensiun yang disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak dari Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman antara lain dalam efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-28/PJ-43/1995 tanggal 22 Mei 1995, perihal Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga Obligasi dan Dividen yang diterima Wajib Pajak orang pribadi (Seri Pph Pasal 23/Pasal 26 No. 6), maka Bunga Obligasi dan Dividen baik dari saham atau sekuritas, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam Negeri Orang Pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong pajak penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

Dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/Pj.101/1996 tanggal 29 Maret 1996.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM TERBATAS I INI.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Terbatas I ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK

Drs. Robert Yogi
Jl. Majapahit 20, B103-104
Jakarta

Ruang lingkup tugas Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.

KONSULTAN HUKUM

Jusuf Inradewa & Partners
Bank Artha Graha Tower, 15th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Legal Audit yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

NOTARIS

Fathiah Helmi, S.H
Jl. Bojonegoro No. 26
Jakarta 10310

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini antara lain membuat perjanjian antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek, dan membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I Perseroan.

PERUSAHAAN PENILAI

PT Inti Utama Penilai
Jl. Balikpapan I No. 6
Jakarta Pusat

Ruang lingkup tugas Penilai adalah melakukan pemeriksaan secara langsung di lokasi dan memberikan pendapat mengenai nilai pasar dari harta tetap Perseroan yang terdiri dari tanah, bangunan dan kendaraan dengan berpedoman pada Standar Penilaian Indonesia dan Kode Etik Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (GAPPI).

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sirca Datapro Perdana
Wisma Sirca
Jl. Johar No. 18, Menteng
Jakarta 10340

Ruang lingkup kerja Biro Administrasi Efek dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini termasuk menerbitkan Daftar Pemegang Saham yang berhak, menerbitkan dan mengirimkan Sertifikat Bukti HMETD kepada setiap Pemegang Saham, melayani permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD, melayani permohonan balik nama atas Sertifikat Bukti HMETD yang sudah diperjual belikan dan memproses pemesanan saham sesuai dengan hak yang dimiliki dan ketentuan yang berlaku sampai dengan penerbitan Surat Kolektif Saham. Dalam hal terjadi adanya hak yang tidak dilaksanakan, maka Biro Administrasi Efek bersama Emiten melakukan proses penjatahan atas pemesanan tambahan, mencetak Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan Laporan Penjatahan. Biro Administrasi Efek juga bertanggung jawab untuk menyesuaikan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Surat Kolektif Saham terhadap setiap tambahan saham yang telah diterbitkan karena adanya pelaksanaan hak, memeriksa kelengkapan dokumen para Pemesan dan memberikan tanda terima pemesanan pembelian saham, menyerahkan Surat Kolektif Saham yang telah selesai diproses kepada Pemesan, dan menyiapkan cek untuk pengembalian uang pemesanan (refund).

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan istimewa dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang no. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal).

XIV. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Sirca Datapro Perdana sebagai Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini, sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dan Agen Pelaksana Penawaran Umum Terbatas I PT Bank NISP Tbk dengan No. 6 tanggal 16 Nopember 1998, yang diubah dengan Akta Pengubahan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Penawaran umum Terbatas I PT Bank NISP Tbk. No. 38 tanggal 27 Nopember 1998 yang keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta.

1. PEMESAN YANG BERHAK

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 14 Desember 1998 pukul 16.00 WIB berhak untuk mengajukan pemesanan pembelian saham baru dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang saham yang memiliki 1.183 (seribu seratus delapan puluh tiga) saham berhak memperoleh 1.200 (seribu dua ratus) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk membeli 1.200 (seribu dua ratus) saham baru dengan nilai nominal Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap saham, dengan harga penawaran Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham.

Pemesan yang berhak membeli saham baru adalah Pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang sah yaitu Pemegang Saham yang Sertifikat Bukti HMETD-nya tidak dijual atau Pembeli / Pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endosemen pada Sertifikat Bukti HMETD. Keterangan tentang HMETD selanjutnya dapat dilihat pada Bab XV dalam Prospektus ini.

Pemesan dapat terdiri dari perorangan Indonesia dan/atau Asing dan/atau Badan Hukum Indonesia dan/atau Asing seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Berita Negara Tahun 1995 Tahun 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608) dengan tunduk pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 1055/KMK.013/ 1989 tanggal 16 September 1989

Untuk memperlancar terpenuhinya jadwal pendaftaran Pemegang Saham yang berhak, maka bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) diwajibkan untuk mendaftarkan di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran Pemegang Saham yaitu tanggal 8 Desember 1998.

2. PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD (SBHMETD) DAN FORMULIR-FORMULIR

Paket SBHMETD yang terdiri atas Prospektus, SBHMETD, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan ("FPPS Tambahan") dan lain-lain tersedia dan didistribusikan melalui Kurir atau Pos Kilat Tercatat kepada para Pemegang Saham sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 15 Desember 1998 yang menyetujui rencana Penawaran Umum Terbatas I ini sampai dengan tanggal 17 Desember 1998.

Mengingat jangka waktu pendistribusian yang sangat berdekatan dengan periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD sehingga dikhawatirkan akan terjadi keterlambatan dalam penerimaan Paket SBHMETD tersebut oleh para Pemegang Saham yang dapat mengakibatkan Pemegang Saham tersebut tidak dapat melaksanakan perdagangan dan pelaksanaan HMETD pada periode yang telah ditentukan, maka dengan ini **disarankan** kepada para Pemegang Saham (atau kuasanya) **untuk mengambil sendiri** Paket SBHMETD tersebut.

Para Pemegang Saham yang berhak diminta dengan hormat untuk mengkonfirmasi secara tertulis kepada BAE baik dengan surat atau melalui faksimili mengenai cara pendistribusian oleh Perseroan dan penerimaan Paket SBHMETD tersebut oleh Para Pemegang Saham yang berhak yakni:

- a. dengan mengambil sendiri Paket SBHMETD tersebut: atau
- b. dikirimkan dengan melalui Kurir atau Pos Paket Kilat Tercatat

Konfirmasi tersebut sudah harus diterima BAE selambat-lambatnya pada **tanggal 8 Desember 1998 pukul 15.00 WIB**

Bagi Pemegang Saham yang berhak atau kuasanya yang telah mengkonfirmasi mengenai kesediaannya mengambil sendiri Paket SBHMETD-nya, dapat mengambil sendiri Paket SBHMETD-nya pada tanggal 15 Desember 1998 (di tempat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan) sampai dengan tanggal 17 Desember 1998 pada hari Senin mulai pukul 9.00 sampai dengan 15.00 BBWI di Kantor BAE sebagaimana tersebut diatas dengan membawa:

- a. Fotokopi KTP/SIM/Pasport (untuk Pemegang Saham perorangan) yang masih berlaku dan fotokopi Anggaran Dasar (bagi Pemegang Saham badan hukum/lembaga). Pemesan berkewarganegaraan asing wajib melampirkan fotokopi jati diri (paspor) yang masih berlaku. Pemegang Saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b. Asli surat Kuasa (jika dikuasakan) untuk mengambil Paket SBHMETD dari Pemegang Saham dengan materai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dilengkapi fotokopi KTP/identitas diri lainnya yang masih berlaku dari yang memberi dan diberi kuasa. Pemesan berkewarganegaraan asing harus mencantumkan nama dan alamat penerima kuasa secara lengkap dan jelas, serta nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemberi kuasa secara lengkap dan jelas. Penerima kuasa tersebut harus juga menunjukkan asli bukti-bukti identitas tersebut.

Perseroan akan melaksanakan pengiriman Paket SBHMETD tersebut bagi Pemegang saham yang berhak yang tidak mengkonfirmasi mengenai kesediaannya untuk mengambil sendiri Paket SBHMETD tersebut mulai tanggal 15 Desember 1998 sampai dengan tanggal 17 Desember 1998.

3. PENDAFTARAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Para Pemegang Saham yang Berhak dan/atau Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang melaksanakan HMETD-nya wajib menyerahkan sendiri atau dikuasakan melalui:

Biro Administrasi Efek
PT Sirca Datapro Perdana
Wisma Sirca
Jl. Johar No. 18, Menteng
Jakarta 10340
Telp.: (021) 3900645, 3905920, 3140032
Fax.: (021) 3900671, 3900652

dimulai pada:

Tanggal : 18 Desember 1998 s/d 28 Desember 1998
Hari : Senin - Jumat
Jam : 09.00 - 15.00 WIB

dengan membawa:

- a. Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD) asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
- b. Bukti pembayaran asli dari Bank berupa bukti transfer bilyet giro/cek/tunai asli dari bank.

- c. Fotocopy KTP/SIM/Paspor (untuk perorangan)/KITAS untuk Pemegang Saham Asing yang masih berlaku, fotocopy Anggaran Dasar (bagi Badan Hukum/Lembaga).
- d. Surat Kuasa asli (jika dikuasakan) bermaterai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dilengkapi dengan fotokopi jatidiri yang memberi dan diberi kuasa. Bagi pemesan berkewarganegaraan asing disamping itu harus mencantumkan nama dan alamat yang diberi kuasa secara lengkap dan jelas, juga wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri / domisili hukum yang sah dari pemberi kuasa secara lengkap dan jelas.

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu hanya dianggap telah dilaksanakan apabila saat pembayaran pemesanan pembelian saham telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tertera pada butir 6 di bawah ini.

4. PEMESANAN TAMBAHAN

Pemegang saham yang Sertifikat Bukti HMETD-nya tidak dijual atau Pembeli / Pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan atau dalam kolom endosemen, dapat memesan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah saham lama yang dimiliki dengan mengisi kolom Pemesanan Tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dalam kelipatan 500 (lima ratus). Pembayaran atas Pemesanan Tambahan tersebut dapat dilakukan paling lambat pada tanggal 28 Desember 1998 (*in good funds*) pada pukul 16.00 WIB. Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. PENJATAHAN PEMESANAN TAMBAHAN

Penjataan Pemesanan Tambahan akan dilakukan pada tanggal 30 Desember 1998 secara proporsional menurut jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta Penambahan Saham berdasarkan harga pesanan.

6. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah secara tunai atau cek, atau bilyet giro, atau pemindahbukuan (*transfer*) pada saat mengajukan pemesanan dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD. Pembayaran tersebut dapat disetor ke rekening:

Bank NISP - Kantor Jakarta
Jl. Gunung Sahari No. 38, Jakarta 10720
Rekening: Right Issue PT Bank NISP Tbk.
No. Rekening: 020 - 010 - 63493 - 2

Semua cek dan wesel Bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel Bank tersebut ditolak oleh Bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan dianggap batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan. Untuk Pemesanan Pembelian Saham Tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus diterima dengan baik dan telah nyata ada di dalam rekening Perseroan (*in good funds*) paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penjataan.

Semua biaya bank serta biaya transfer yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan.

Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan melalui PT Sirca Datapro Perdana yang menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan kepada pemesan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham yang merupakan bagian dari Sertifikat Bukti HMETD yang telah dicap dan ditandatangani sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham tersebut yang merupakan salah satu bukti pada saat mengambil surat kolektif saham dan pengembalian uang pemesanan yang tidak terpenuhi.

Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. PEMBATALAN PEMESANAN SAHAM

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pembatalan pemesanan saham tersebut diantaranya dapat disebabkan oleh:

- Porsi kepemilikan asing telah mencapai 49% dari seluruh saham Perseroan yang telah dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia apabila pemesanan tersebut dilakukan oleh pemodal asing
- Pengisian formulir tidak benar atau tidak lengkap;
- Pembayaran untuk pemesanan tidak diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan.
- Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pesanan tambahan, yaitu tanggal 30 Desember 1998.

9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka pengembalian uang dilakukan oleh PT Sirca Datapro Perdana atas nama Perseroan yang akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu tanggal 4 Januari 1999. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga dengan memperhatikan tingkat jasa giro yang berlaku pada PT Bank BNI Tbk. pada tanggal pengembalian uang pemesanan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pengembalian uang dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan cara pemindahbukuan ke rekening pemesan atau menggunakan cek atas nama pemesan yang dapat diambil oleh pemesan mulai tanggal 4 Januari 1999 pada PT Sirca Datapro Perdana dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB.

Uang pengembalian hanya dapat diambil dengan menunjukkan KTP asli atau bukti jati diri lainnya dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Pemesan tidak dikenakan biaya bank maupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Bila pemesan berhalangan untuk mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan kuasa kepada orang yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermeterai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa, serta menunjukkan KTP asli pemberi dan penerima kuasa.

10. PENYERAHAN SURAT KOLEKTIF SAHAM

Surat Kolektif Saham dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat) antara pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB mulai tanggal 21 Desember 1998 sampai dengan tanggal 4 Januari 1999 di:

Biro Administrasi Efek
PT Sirca Datapro Perdana
Wisma Sirca
Jl. Johar No. 18, Menteng
Jakarta 10340
Telp.: (021) 3900645/5920, 3140032
Fax.: (021) 3900671, 3900652

Dengan menunjukkan KTP asli atau tanda jati diri asli lainnya atau Anggaran Dasar (jika berbentuk Badan Hukum/Lembaga) dan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Jika pengambilan Surat Kolektif Saham tersebut dikuasakan, maka penerima kuasa harus melampirkan surat kuasa bermeterai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa serta menunjukkan KTP asli pemberi dan penerima kuasa tersebut.

Penyerahan Surat Kolektif Saham tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Bagi pemesan yang memesan kurang dari atau sama dengan jumlah hak yang dimiliki, maka Surat Kolektif Saham akan diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pendaftaran dan pembayaran uang pemesanan diterima dengan baik dan nyata pada rekening Perseroan (in good funds).
- b. Bagi pemesan yang memesan lebih dari hak yang dimiliki, pembayaran uang pemesanan tambahan harus diterima dengan baik pada rekening bank Perseroan (in good funds) selambat-lambatnya tanggal 28 Desember 1998. Sedangkan kelebihan pemesanan saham diatas jumlah haknya akan dilakukan penjatahan secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1998 dan Surat Kolektif Saham hasil pemesanan pembelian saham tambahan akan diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

11. ALOKASI TERHADAP BUKTI HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN

Jika saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu maka sisanya akan di alokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan FPPS tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

XV. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I ini diterbitkan berdasarkan Hak Untuk Memesan Efek Terlebih Dahulu selanjutnya disebut "HMETD" yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian saham.

1. YANG BERHAK MENERIMA SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 14 Desember 1998 pukul 16.00 WIB dengan ketentuan batas waktu penerimaan permohonan pendaftaran di BAE Perseroan selambat-lambatnya tanggal 8 Desember 1998.

2. PEMEGANG BUKTI HMETD YANG SAH

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 14 Desember 1998 pukul 16.00 WIB yang Sertifikat Bukti HMETD-nya tidak dijual dan/atau pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endosemen Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan tanggal terakhir perdagangan 24 Desember 1998.

3. PERDAGANGAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Sertifikat Bukti HMETD ini dapat dijual atau dialihkan selama masa perdagangan Sertifikat Bukti HMETD, mulai tanggal 18 Desember 1998 sampai dengan tanggal 24 Desember 1998.

Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang bermaksud mengalihkan haknya tersebut dapat melaksanakannya melalui atau tanpa Perantara Pedagang Efek yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta sesuai dengan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

4. BENTUK DARI SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Dalam Sertifikat Bukti HMETD dicantumkan nama dan alamat Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham, jumlah saham yang dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan tambahan saham, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

5. PERMOHONAN PEMECAHAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Bagi Pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah HMETD yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, maka pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi Biro Administrasi Efek, PT Sirca Datapro Perdana, untuk mendapatkan pecahan jumlah HMETD yang diinginkan. Pecahan HMETD terkecil adalah 5.000 (lima ribu).

Bagi pemegang HMETD yang akan memecah SBHMETD dapat mengajukan permohonan pemecahan SBHMETD secara tertulis mulai tanggal 16 Nopember 1998 sampai dengan tanggal 8 Desember 1998 kepada Perseroan melalui :

Biro Administrasi Efek
PT Sirca Datapro Perdana
 Wisma Sirca
 Jl. Johar No. 18, Menteng
 Jakarta 10340
 Telp.: (021) 3900645/5920, 3140032
 Fax.: (021) 3900671, 3900652

Setiap pemecahan SBHMETD akan dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditambah PPN sebesar 10% setiap lembar SBHMETD hasil pemecahan yang diterbitkan dan dibayar pada saat permohonan diajukan menjadi beban pemesan.

6. NILAI HMETD

Nilai HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya. Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD:

Diasumsikan harga pasar satu saham	=	Rp. a
Harga Saham Penawaran Umum Terbatas I	=	Rp. 500,-
Penawaran Umum Terbatas I dengan perbandingan 1.183 : 1.200 (pemegang 1.183 saham lama mempunyai hak membeli 1.200 saham baru)		
Harga Teoritis Saham Baru	=	$\frac{(Rp. a \times 1.183) + (Rp. 500 \times 1.200)}{(1.183 + 1.200)}$
	=	Rp. c
Harga HMETD	=	Rp. a - Rp. c

7. PENGGUNAAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Sertifikat Bukti HMETD ini adalah untuk memesan saham yang ditawarkan oleh Perseroan. Sertifikat Bukti HMETD ini tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, dan Sertifikat Bukti HMETD ini tidak dapat diperjual belikan dalam bentuk fotokopi.

8. PEMBATASAN ATAS PERDAGANGAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD SEHUBUNGAN DENGAN PORSI KEPEMILIKAN ASING ATAS SAHAM

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum tanggal 30 Oktober 1992, persentase kepemilikan asing dalam suatu Bank Umum tidak diperkenankan melebihi 49% dari seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek. Dengan demikian apabila persentase kepemilikan asing dalam Perseroan telah mencapai 49% dan dimana ada perdagangan Sertifikat

Bukti HMETD yang berasal dari pemegang saham Indonesia kepada pemegang saham asing, maka akan terdapat kemungkinan Sertifikat Bukti HMETD tersebut tidak dapat dikonversikan menjadi saham.

Dengan demikian pemodal asing yang merencanakan untuk membeli Sertifikat Bukti HMETD pada masa perdagangan Sertifikat Bukti HMETD dianjurkan untuk terlebih dahulu memeriksa kepemilikan saham oleh Pemodal Asing kepada PT Sirca Datapro Perdana pada Penawaran Umum Terbatas I ini. Pemegang saham asing yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sampai tanggal 14 Desember 1998 pukul 16.00 WIB yang merupakan tanggal terakhir Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak akan dijamin memperoleh Haknya.

Apabila persentase kepemilikan saham asing selama periode perdagangan (tanggal 18 Desember 1998 sampai dengan 24 Desember 1998) belum mencapai 49%, maka penerimaan pemesanan saham akan dilakukan dengan cara pemohon pertama dilayani lebih dahulu (*first come first serve*) untuk memperoleh sisa saham yang masih boleh dimiliki oleh pemegang saham asing.

9. PECAHAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Dalam hal pemegang saham mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam bentuk pecahan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut tidak diserahkan kepada para pemegang saham, namun akan dikumpulkan oleh Perseroan dan Perseroan akan mengeluarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam bentuk bulat dan selanjutnya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut dijual serta hasil penjualan tersebut dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

10. LAIN-LAIN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak (HMETD) menjadi beban Pemegang HMETD atau calon Pemegang HMETD.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)

1. Prospektus bersama dengan Sertifikat Bukti HMETD, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan akan disediakan oleh Perseroan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan dan akan dikirimkan kepada para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 14 Desember 1998 pukul 16.00 WIB. Dan Informasi Penting juga telah diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional.
2. Bagi yang belum menerima sampai dengan tanggal 17 Desember 1998 dapat menghubungi:

Biro Administrasi Efek
PT Sirca Datapro Perdana
Jl. Johar No. 18, Menteng
Jakarta 10340
Telp.: (021) 3900645/5920, 3140032
Fax.: (021) 3900671, 3900652

3. Apabila sampai dengan tanggal 17 Desember 1998 pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 14 Desember belum menerima atau mengambil Prospektus dan Sertifikat Bukti HMETD, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dan tidak menghubungi PT Sirca Datapro Perdana, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab Biro Administrasi Efek ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

XVII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila Pemegang Saham menginginkan tambahan informasi, para Pemegang Saham dipersilahkan menghubungi:

PT BANK NISP Tbk.
Kantor Jakarta
Jl. Gunung Sahari No. 38, Lantai 4
Jakarta 10720
Telp.: (021) 6009037-38 ; Fax.: (021) 6006507, 6492264
Telex: 41467, 41287 NISPJK IA

Halaman ini sengaja dikosongkan

